



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGAWASAN ADMINISTRASI PENYALURAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA
SMP NEGERI DI KABUPATEN SINTANG**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun oleh :
ELISABETH RAFIKA**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

2012

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN KEASLIAN

TAPM yang berjudul “Pengawasan Administrasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri di Kabupaten Sintang” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik,

Pontianak, 2012.

Yang menyatakan



ELISABETH RAFIKA
NIM. 015974082

ABSTRACT**The Administrative Control of
School Operational Fund for Junior High Schools (SMP) in Sintang Regency****Elisabeth Rafika**

OPEN UNIVERSITY

rafikaeli@yahoo.co.id

Keyword : controlling, administrative, School Operational Fund (BOS)

This research was carried out to find out the way how administrative control plays its role to the distribution of School Operational Fund controlling for State Junior High School in Sintang Regency. The first variable used in this research is controlling, such as the aims of controlling, the factors supporting the controlling, the principles of controlling, the characteristics and time of controlling, monitoring and evaluation. Meanwhile, the second variable is distribution administration which covers the first distribution, the second distribution, and three-month distribution.

The method used in this research is descriptive research. The subject of research consists of one person from School Operational Fund Management in Sintang Regency, two principals of Junior High School in Sintang Regency, and 2 members of School Committee from Junior High School in Sintang. The data collecting was carried out through literature study and interviews and then it was analyzed.

The result of research shows that the administrative control contributed great impact to the smoothness, the accountability, and the accuracy of distribution and usage of School Operational Fund in Junior High School in Sintang Regency. It is also concluded that the competency of the human resources in administering and managing the School Operational Fund and geographical condition greatly effects the smoothness of the School Operational Fund distribution in Sintang Regency.

ABSTRAK**Pengawasan Administrasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri di Kabupaten Sintang****Elisabeth Rafika**

Universitas Terbuka

rafikaeli@yahoo.co.id

Kata Kunci : Pengawasan, Administrasi, Dana BOS

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana peranan pengawasan terhadap administrasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pertama variabel pengawasan, yang meliputi tujuan pengawasan, faktor-faktor pendukung pengawasan, asas pengawasan, sifat dan waktu pengawasan, monitoring serta evaluasi. Kedua, variabel administrasi penyaluran, meliputi waktu penyaluran tahap pertama, penyaluran tahap kedua, serta penyaluran setiap triwulan.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari 1 (satu) orang tim manajemen BOS di Kabupaten Sintang dan 2 (dua) orang Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sintang 2 (dua) orang guru dan 2 (dua) orang Komite Sekolah dari masing-masing SMP. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk selanjutnya data dianalisis.

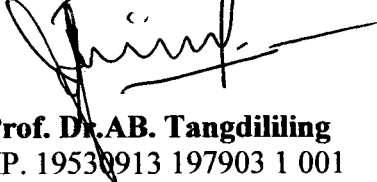
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BOS di Kabupaten Sintang memberikan dampak yang besar dalam penyaluran dana BOS khususnya dan program BOS pada umumnya. Hasil analisa menunjukkan terhadap pengawasan dana BOS di Kabupaten Sintang diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan sangat berperan dalam kelancaran penyaluran dana BOS ke sekolah penerima, disisi lain kemampuan SDM dalam mengadministrasikan atau mengelola dana BOS, serta kondisi geografis sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyaluran dana BOS di Kabupaten Sintang.

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul TAPM : Pengawasan Administrasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri di Kabupaten Sintang
 Penyusun TAPM : Elisabeth Rafika.
 NIM : 015974082
 Program Studi : Magister Administrasi Publik.
 Hari/Tanggal :

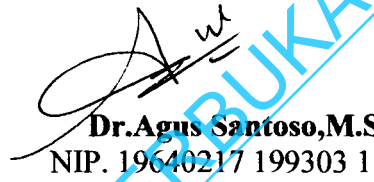
Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. AB. Tangdililing
 NIP. 19530913 197903 1 001

Pembimbing II,



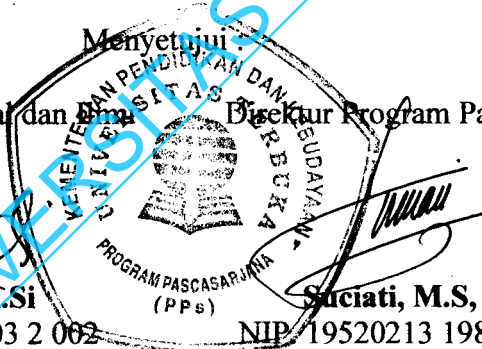
Dr. Agus Santoso, M.Si
 NIP. 19640217 199303 1 001

Menyetujui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Direktur Program Pascasarjana,



Dra. Susanti, M.Si
 NIP. 19671214 199303 2 002



Suciati, M.S, Ph.D

NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

N a m a : Elisabeth Rafika
NIM : 015974082
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Pengawasan Administrasi Penyaluran Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada
SMP Negeri di Kabupaten Sintang

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Juli 2012
W a k t u : 10.15 – 12.15 Wib

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua komisi penguji : Ir.Eduard Zubir, MM

Penguji Ahli : Dr. Liestyodono B.I. M.Si

Pembimbing I : Prof.Dr.A.B. Tangdililing

Pembimbing II : Dr. Agus Santoso, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji Sukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan TAPM dengan judul Pengawasan Administrasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Kabupaten Sintang. TAPM ini masih terdapat banyak kelemahan dan sungguh jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mohon kritikan dan saran sebagai masukan agar tulisan ini semakin baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan serta dorongan selama perkuliahan hingga selesainya penyusunan TAPM ini, terutama kepada Prof.Dr.AB.Tangdililing selaku Dosen Pembimbing I yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga TAPM/tesis ini dapat terselesaikan, Dr.Agus Santoso,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan serta koreksi sehingga tulisan ini semakin baik. Terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada :

1. Pimpinan dan segenap pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka atas bantuan dan layanan selama menjadi mahasiswa hingga selesainya TAPM ini.

2. Seluruh Dosen pengajar yang telah membimbing dan membina penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya TAPM ini, semua ilmu dan pengetahuan yang disampaikan sungguh berguna bagi penulis dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
3. Kepala Dinas Pendidikan beserta segenap staf dan karyawan yang sungguh sangat membantu dalam memberikan data dan informasi, sehingga memperlancar penulis dalam menyusun TAPM ini.
4. Semua rekan seperjuangan Mahasiswa Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, yang saling memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis tetap bersemangat untuk menyelesaikan TAPM ini.
5. Suami tercinta Anselmus Triadmo Widodo, yang selalu memberikan semangat dan cinta kasih, anak-anakku Gregorius Elrido Widratama, Benedik Tipando Jaya Singgatalang, dan Josep Alvey Triendo yang selalu menjadi semangat dalam mengikuti perkuliahan dan selama menyelesaikan TAPM ini.
6. Kedua orang tua ku D.Pandji Willem dan M.L.Isma serta seluruh Keluarga Besar ku atas semua dukungan dan cinta kasih sayang yang diberikan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam penyusunan TAPM ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segenap bantuan yang diberikan semoga Tuhan Maha Pengasih memberikan Rahmat dan Pertolongan serta kebaikan kepada kita semua, penulis menyadari tulisan ini sungguh jauh dari harapan namun demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat berguna bagi

penulis khususnya, bagi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, bagi pembaca dan untuk masukan bagi penelitian yang akan datang.

Sintang,.....

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Keaslian	i
Abstract	ii
Abstrak	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Identifikasi Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	10
1. Administrasi Publik	10

2. Administrasi Keuangan Publik	15
3. Pengawasan	21
a. Monitoring	31
b. Evaluasi	34
4. Penyaluran Dana BOS	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Alat Pengumpulan Data	46
E. Subyek Penelitian	46
F. Analisis Data	47
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	48
1. Keadaan Umum Kabupaten Sintang	48
2. Gambaran Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang	50
3. Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta	55
4. Jumlah Penerima Dana BOS	55
B. Pengawasan BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang	57
1. Tujuan Pengawasan	66
2. Faktor Pendukung Pengawasan	69

3. Asas-asas Pengawasan	73
4. Sifat dan Waktu Pengawasan	80
5. Monitoring	84
6. Evaluasi	91
C. Administrasi Penyaluran Dana BOS	94
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	99
A. Simpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	106

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran	41
Bagan 3.1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang	52

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten	
Sintang	55
Tabel 3.2. Gambaran Umum SMP yang menjadi Narasumber	63

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat permohonan ijin penelitian TAPM dari UPBJJ-UT Pontianak.....	106
2. Surat ijin penelitian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang	107
3. Daftar pertanyaan dan jawaban wawancara	108
4. Biodata Mahasiswa	136
5. Jurnal	137

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Identifikasi Masalah

Undang-undang No 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, pada pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemda menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana pemda lainnya di Indonesia melaksanakan program-program yang mendukung terwujudnya wajib belajar tersebut, diantaranya dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta berusaha mengelola dana bantuan yang mendukung terjaminnya kelangsungan pendidikan secara optimal. Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program yang diharapkan untuk dapat meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dan dapat menekan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Dengan diberikannya dana BOS tersebut diharapkan pihak sekolah mampu mengelola dana tersebut sebaik-baiknya dan tepat sasaran.

Pengelolaan dana BOS yang baik di sekolah dapat terlihat dari pengelolaan administrasi BOS yang ada. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dapat terlihat melalui laporan-laporan yang tersaji dengan baik, di mana pemanfaatan dana yang sesuai dengan perencanaan menunjukkan bahwa berbagai kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, sehingga proses pengadministrasian dana BOS

memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan program BOS di setiap daerah pada umumnya dan di sekolah khususnya. Secara teknis menurut The Liang Gie (*dalam Sundarso;2007:1.12*) menyebutkan bahwa administrasi secara horizontal dari aspek teknis mencakup:

a. Organisasi (*organization*), b. Manajemen (*management*), c. Kepegawaian (*personnel*), d. Keuangan (*finance*), e. Perlengkapan (*Supply*), f. Pekerjaan kantor (*office work*), g. Tata hubungan (*communication*), h. Perwakilan (*representation*). Selanjutnya dari aspek keuangan (*finance*) ini lah timbul administrasi keuangan yang mencakup antara lain penganggaran belanja (*budgeting*), *Accounting* (pembukuan), *Auditing* (pemeriksaan) serta tindakan-tindakan lainnya dalam bidang keuangan. (*The Liang Gie dalam Sundarso,2007:1.14*)

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam administrasi, baik itu administrasi publik atau privat, aspek keuangan memegang peranan yang sangat penting sejalan dengan aspek-aspek lainnya, demikian pula dengan pengawasan atau pemeriksaan keuangan maupun pengadministrasian keuangan adalah aspek yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peranan pengawasan dari instansi terkait dalam penyaluran dana BOS tersebut sangat penting, mengingat dalam mekanisme penyaluran terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah agar dapat melakukan pencairan dan penarikan kembali dana BOS untuk triwulan berikutnya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyerahan laporan penggunaan dana triwulan sebelumnya, dengan demikian syarat administrasi dari sekolah penerima haruslah dipenuhi agar penyaluran untuk triwulan berikutnya tepat waktu.

Penyerapan dana yang sesuai dengan jadwal merupakan salah satu instrumen dalam pengawasan penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah penerima,

dengan mengawasi administrasi pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS diharapkan mampu memperkecil tingkat kesalahan dalam berbagai aspek pembiayaan dan pemanfaatan dana BOS. Pihak pengawas penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah wajib memantau administrasi penggunaan dana BOS sebelumnya sebagai syarat agar dana triwulan berikutnya dapat dicairkan/diambil oleh pihak sekolah. Pengawasan terhadap penyerapan dana ke sekolah penerima perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana BOS sesuai dengan peruntukannya, dalam kenyataannya penyerapan dana ke sekolah-sekolah penerima sering mengalami kendala atau keterlambatan, hal tersebut disebabkan karena sekolah penerima belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana triwulan sebelumnya. Berbagai aspek yang menjadi kendala dalam penyerahan administrasi pengelolaan dana BOS yang baik dan tepat waktu diantaranya adalah kemampuan SDM yang kurang memadai dari hal kualitas dan kuantitas, letak geografis, sarana prasarana yang tidak memadai dan sebagainya.

Menurut Suyanto (2011), banyak daerah yang kurang memiliki komitmen kuat untuk memajukan pendidikan. Hal ini terlihat dari banyaknya daerah yang terlambat menyalurkan dana BOS. Dari paparan tersebut jelas bahwa penyaluran dana yang tepat waktu akan berdampak besar terhadap kemajuan pendidikan, hal tersebut tidak terlepas dari peranan dana tersebut sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Lebih lanjut Suyanto (2011) menyatakan bahwa dirinya menyayangkan lambatnya proses pencairan dana BOS di daerah,

padahal pusat telah mentransfer dana sesuai dengan jadwal, dengan harapan bisa segera digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Dinas Pendidikan sebagai instansi yang terkait langsung dalam pengawasan dana BOS baik dari perencanaan, penyaluran, dan pelaporan diharapkan mampu melakukan pengawasan pada tahapan-tahapan penyaluran dana tersebut ke sekolah-sekolah penerima. Peranan pengawasan dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, serta memastikan bahwa tahapan-tahapan penyerapan dana tersebut sesuai dengan jadwal yang ada. Peranan pengawasan juga diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan dalam pengelolaan dana BOS yang baik dan benar sesuai dengan tujuan dari pemberian dana tersebut. Penyaluran dan pengadministrasian dana BOS merupakan proses atau tahapan yang perlu diawasi dengan baik, karena hal tersebut akan berdampak pada pemanfaatan dan penggunaan dana yang tepat sasaran, sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian yang serius terhadap pengawasan dan penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah penerima yang meliputi kegiatan pengadministrasian dan proses penyaluran. Mendikbud, Muhammad Nuh menyatakan : “Beberapa hal yang akan dimonitor misalnya waktu transfer ke rekening-rekening sekolah, jumlah uang yang ditransfer dan dikontrol penggunaan dana tersebut oleh sekolah-sekolah yang bersangkutan” (Tempo Interaktif, 2011).

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan penunjang dalam menciptakan akuntabilitas publik, menurut Yulianto (2000), sebuah kriteria yang bisa dipakai untuk mengukur derajat akuntabilitas publik adalah akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara oleh pemerintah. Hal tersebut berarti semakin baik pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel sebuah pemerintahan atau negara, dimana nilai-nilai keterbukaan, transparansi, dan peranan berbagai pihak atau *stakeholders* menjadi unsur-unsur yang terkandung di dalam pengelolaannya.

Menurut Yulianto (2000) menyebutkan :

Sistem pengawasan memegang peranan kunci dalam menjembatani laporan pertanggungjawaban Negara dan penyelenggaraan aktivitas pemerintah secara riil. Jika sistem pengawasan efektif, tentu akan mendorong pelaksanaan pemerintahan yang efektif sehingga tingkat penyelewengan keuangan Negara minimal dan pada akhirnya laporan pertanggungjawaban APBN/APBD bisa diterima karena memang benar-benar *accountable*.

Tahapan-tahapan penyaluran dana BOS juga harus selalu di pantau dan di monitor oleh pihak terkait, dalam hal ini untuk melihat sejauh mana penyerapan dan penggunaan dana tersebut, sehingga monitoring merupakan salah satu bentuk pengawasan yang melekat dari instansi terkait guna memastikan bahwa tahapan-tahapan penyaluran dana tersebut telah sesuai dengan jadwal yang diprogramkan. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik dari anggaran sektor publik yang transparan, menurut Mardiasmo (2009:12) menyatakan bahwa pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan pihak terkait dapat melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana yang telah dianggarkan, menurut Mardiasmo (2009:64) menyatakan sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran digunakan untuk memberi

informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan. Berdasarkan hasil pengawasan dan monitoring berbagai data dan informasi yang berkenaan dengan penyaluran dan penyerapan dana BOS akan dapat dievaluasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dengan evaluasi tersebut berbagai kendala yang mungkin dihadapi oleh berbagai pihak mampu ditemukan pemecahan masalahnya, dengan demikian mampu memberikan solusi dan masukan yang berguna bagi instansi terkait maupun pihak sekolah penerima, dan mampu memperkecil kesalahan-kesalahan dimasa yang akan datang.

Pihak-pihak terkait seperti Bank Dunia (*World Bank*) dapat melakukan monitoring ke sekolah penerima karena sumber dana BOS berasal dari Bank Dunia dan APBN, Bank Dunia harus melihat langsung ke sekolah terkait data dan pelaporan serta penggunaan dana BOS. Selanjutnya pihak *World Bank* dapat memberikan rekomendasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk tidak mencairkan dana ke sekolah-sekolah, sebelum melalui pertanggungjawaban (Redaksi KBSK, 2011). Berdasarkan paparan tersebut fungsi monitoring dalam sebuah program akan memberikan rekomendasi sebagai masukan dan perbaikan untuk kemajuan program tersebut secara lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah membentuk tim monitoring evaluasi (monev) yang terdiri personil dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten dan Kota. (Republika, 2011).

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini penulis membatasi pada pengawasan terhadap administrasi penyaluran dana BOS, dimana penulis akan melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terhadap administrasi penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah penerima. Peneliti juga akan melihat bagaimana peran monitoring dan evaluasi dalam memberikan kontribusi yang baik agar penyaluran dana BOS dapat sesuai dengan jadwal dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Data yang ada selanjutnya akan di olah sedemikian rupa agar menjadi informasi yang mampu menggambarkan bagaimana pengawasan terhadap penyaluran administrasi dana BOS di Kabupaten Sintang, serta bagaimana kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait untuk selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori yang ada.

C. Perumusan Masalah

Merujuk pada uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, terhadap administrasi penyaluran dana BOS.
2. Bagaimana peranan monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan penyaluran yang sesuai dengan jadwal yang ada.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam hal peningkatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi yang ada terkait administrasi penyaluran yang akuntabel dan tepat waktu.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk :

1. Mengkaji peranan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
2. Mengkaji peranan monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan penyaluran dana BOS yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Mengkaji upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam hal peningkatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi terkait administrasi penyaluran yang akuntabel dan tepat waktu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah ilmu pemerintahan khususnya teori-teori administrasi dan pengawasan pada pengelolaan keuangan publik dari tingkat yang paling bawah seperti SMP Negeri yang tersebar di pelosok NKRI. Selain itu, untuk mendorong dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat mendeskripsikan cara-cara yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam melakukan pengawasan yang baik dan mampu memberikan kontribusi bagi penyaluran dana BOS yang semakin baik di masa yang akan datang.
- b. Dapat digunakan sebagai masukan dalam mengembangkan metode yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi terkait penyaluran dana BOS yang tepat waktu.
- c. Dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terkait peningkatan pengawasan serta monev di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Pelayanan publik yang baik merupakan *output* dari pengelolaan sektor publik yang baik pula, manajemen yang baik dalam sebuah organisasi lingkup negara sangat berbeda dengan pengelolaan administrasi sektor privat. Dalam sebuah negara berbagai aspek baik itu aspek sosial, budaya, keamanan, dan berbagai aspek lain turut mempengaruhi pengelolaan administrasi publik. The Liang Gie *dalam* Sundarso (2007:1.10) menyatakan bahwa administrasi publik (*publik administration*) sebagai usaha kerjasama dalam hal-hal yang mengenai kenegaraan pada umumnya merupakan pemberian pelayanan terhadap segenap kehidupan warga Negara yang terdapat di dalam Negara itu.

Selanjutnya ciri-ciri kegiatan pelayanan tersebut adalah :

- a. Kegiatan itu merupakan sesuatu yang lebih urgent dari pada yang diselenggarakan pihak swasta.
 - b. Kegiatan itu mempunyai corak monopoli atau setengah monopoli.
 - c. Kegiatan itu terikat oleh peraturan-peraturan hukum.
 - d. Kegiatan itu tak bergantung kepada pertimbangan harga pasar.
 - e. Kegiatan itu berlangsung di bawah pengawasan rakyat, terutama dalam Negara dengan sistem demokrasi.
- (The Liang Gie *dalam* Sundarso , 2007:1.10)

Definisi administrasi publik menurut Dwight Waldo *dalam* Sundarso (2007:1.16) menyatakan bahwa *Public administration* adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. *Public administration* adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam administrasi publik peranan SDM dalam megendalikan sumber-sumber daya lain yang ada di dalam organisasi sangat penting, ada unsur seni dan ilmu manajemen yang akan digunakan untuk mengelola sumber daya tersebut agar tujuan negara dapat tercapai. Sementara itu definisi lain dari Administrasi negara sebagai beriku :

1. *Public administration is cooperative group effort in public setting.*
 2. *Public administration covers all three branches: executive, legislative and judicial, and their interrelationships.*
 3. *Public administration has important role formulating of public policy and is this a part of the political process.*
 3. *Public administration is cosely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community.*
 4. *Public administration is different in significant ways from private administration.*
- (Syafiie, 1997: 24)

Berdasarkan definisi tersebut, cakupan Administrasi publik sangat luas dan berkaitan dengan berbagai aspek dan lembaga-lembaga serta kelompok yang ada di dalam negara, ada kaitan yang erat antara pihak swasta dan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kelemahan dan ciri-ciri administrasi Negara di Negara berkembang dipaparkan oleh Sundarso (2007:6.7) sebagai berikut :

a. Pola dasar sistem birokrasinya merupakan tiruan atau jiplakan dari sistem administrasi kolonial. b. Birokrasi pemerintahan kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi kepemimpinan, manajemen, kemampuan dan ketrampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. c. Birokrasi cenderung mengutamakan atau berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat atau pencapaian sasaran yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. d. Apa yang dinyatakan baik secara tertulis maupun lisan oleh birokrasi sering tidak sesuai dengan kenyataan. e. Birokrasi cenderung bersifat otonom dalam proses politik dan pengawasan masyarakat, dalam hal ini birokrasi seakan menjadi menara gading yang tidak tersentuh.

Kelemahan-kelemahan yang sering di jumpai seperti pada paparan di atas, merupakan tantangan tersendiri bagi banyak Daerah di Indonesia dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan publik yang sesuai dengan harapan dan sasaran yang ingin di capai, perkembangan di berbagai sektor membuat tuntutan pengelolaan administrasi Negara yang semakin baik, dan mampu mengikuti perkembangan jaman semakin tak terelakan, tuntutan akan kemampuan SDM dan berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya semakin tinggi. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi (Mardiasmo,2009:4). Tuntutan baru yang menuntut agar organisasi sektor publik memperhatikan *Value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep

pengelolaan organisasi publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu :

a). Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah, b). Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. c). Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Disamping tiga elemen tersebut terdapat dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*), dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi, Sedangkan pemerataan artinya penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya berkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. (Mardiasmo,2009:4).

Sejalan dengan tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi atau Negara, kebutuhan terhadap pengelolaan yang lebih terbuka dan transparan adalah salah satu indikator penunjang demokratisasi sebuah Negara, oleh sebab itu pengelolaan sumber daya yang baik sesuai dengan prinsip tersebut menjadi semakin penting bagi Negara-negara yang ingin menciptakan *good governance*. “Jantung *good governance* adalah akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk bertanggungjawab atas berbagai kegiatan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan”. (*World Bank dalam Sundarso;2007:9.22*). *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan

korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo. 2009:18). UNDP memberikan beberapa karakteristik dari pelaksanaan Good governance yang meliputi : *Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan Strategic vision.* (Mardiasmo, 2009:18)

Akuntabilitas dalam administrasi negara merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam menciptakan negara yang demokratis, maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lain, pelayanan yang baik kepada warga negara akan menciptakan masyarakat yang semakin berkualitas. Pelayanan kepada masyarakat tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui wakil-wakilnya di lembaga Negara (DPR/DPRD), atau melalui lembaga-lembaga lain yang mengawasi pemanfaatan dana pemerintah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan dalam pengelolaan negara akan mampu menciptakan *good governance*.

Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (*public funds*). Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik. (Mardiasmo, 2009:10)

The oxford advance learner's dictionary (dalam Sundarso; 2007:9.22) menyatakan bahwa “*required or expected to give an explanation for one's action*. Artinya, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk kegiatannya, terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.” Dalam pengelolaan kegiatan Negara dibutuhkan juga keterbukaan dalam proses kegiatan, adanya prosedur yang jelas sehingga kegiatan pelayanan publik menjadi semakin cepat dan tepat, efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam proses dijelaskan sebagai berikut :

Akuntabilitas proses terkait dengan proses yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. (Sundarso, 2007:9.22)

2. Administrasi keuangan publik

Administrasi keuangan publik merupakan bagian dari Administrasi publik. Administrasi keuangan negara yang baik adalah syarat dalam penciptaan *good governance*, keuangan Negara sering juga di sebut keuangan publik (Ikhsan, 2007: 1.25). lebih lanjut Arsjad dalam Ikhsan(2007:1.26) mendefinisikan keuangan negara sebagai berikut: “Keuangan negara mencerminkan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang keuangan, yakni dalam mencari sumber-sumber dana atau

penerimaan (*source of fund*) dan bagaimana dana yang diperoleh tersebut digunakan (*use of fund*) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.” Ruang lingkup keuangan publik meliputi hal-hal sebagai berikut: Pengeluaran atau belanja negara (baik pusat maupun daerah), Penerimaan negara (baik pusat dan atau daerah) dan dampak pengeluaran atau belanja negara dan penerimaan negara terhadap kehidupan masyarakat atau dampak APBN atau APBD terhadap kehidupan masyarakat (Wordpress, 2008). Keuangan Negara meliputi sembilan aspek yaitu:

- a). Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b). Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; c). Penerimaan negara; d). Pengeluaran negara; e). Penerimaan daerah; f). Pengeluaran daerah; g). Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan negara; h). Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i). Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. (Bahtiar, 2009:108).

Dalam keuangan Negara tercermin sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara, pengeluaran negara memuat alokasi anggaran yang diperuntukan dalam pembiayaan pembangunan baik fisik maupun non fisik, anggaran didefinisikan secara berbeda-beda, menurut Suparmoko dalam Ikhsan (2007:9.4) menyatakan : “yang dimaksud dengan anggaran (*budget*) ialah suatu daftar atau pernyataan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu

tertentu, biasanya satu tahun”. Lebih lanjut Ikhsan (2007:9.5) menyatakan bahwa anggaran mencakup beberapa hal :

- a. Anggaran merupakan suatu alokasi sumber daya.
- b. Anggaran merupakan suatu rencana.
- c. Anggaran mencakup sektor atau aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan pada masa mendatang.
- d. Anggaran memperhitungkan berbagai variabel penting.
- e. Anggaran dibuat untuk mencapai sejumlah tujuan.
- f. Anggaran menghubungkan antar penerimaan dan pengeluaran.
- g. Anggaran mengukur dan mengontrol penerimaan dan pengeluaran.

Anggaran juga mencerminkan politik pengeluaran pemerintah baik secara kuantitatif maupun kualitatif, karena itu dalam anggaran juga terkandung :

- a. Pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lainnya oleh pemerintah dari seluruh rakyat.
- b. Hubungan antara penggunaan dana dengan cara penarikannya (cara-cara memperoleh dana tersebut).
- c. Pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian. (Ikhsan, 2007:9.6).

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peranan anggaran sangat penting dan mencakup aspek yang luas dari sebuah aktivitas organisasi ataupun negara, melalui anggaran semua perencanaan yang telah ditetapkan akan dapat dikontrol atau diawasi apakah telah sesuai dengan perencanaan awal, dan apakah pengelolaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan termasuk mekanisme penarikan dan pengadministrasian secara umum serta

tepat sasaran. Pengelolaan keuangan Negara harus memperhatikan asas-asas keuangan Negara diantaranya adalah :

- a. Asas tahunan, anggaran yang disusun, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah serta diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah untuk satu tahun tertentu.
- b. Asas universalitas, keuangan Negara meliputi seluruh transaksi dan pembiayaan serta asset dan hutang Negara/Daerah setiap transaksi-transaksi keuangan Negara tersebut harus ditampilkan atau dimuat dalam dokumen anggaran.
- c. Asas kesatuan, keuangan Negara dikelola sebagai satu kesatuan artinya pendapatan dan belanja disajikan dalam satu dokumen anggaran untuk seluruh kementerian Negara lembaga atau satuan kerja perangkat daerah.
- d. Asas spesialisasi, alokasi anggaran yang disediakan (Kredit anggaran) diungkapkan terinci dan peruntukan jelas dalam suatu mata anggaran atau rekening belanja yang ditetapkan.
- e. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, keuangan Negara dapat dipertanggungjawabkan dengan orientasi pada hasil atau dampak dari kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Hal ini mendorong penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja (*performance budget*), sehingga pencapaian pelaksanaan anggaran dapat diukur efisiensi, efektifitas, dan ekonominya.
- f. Asas profesionalitas, pengelola keuangan Negara dilakukan secara profesional. Oleh karena itu pengelolaan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui dewan perwakilan terkait.
- g. Asas proporsionalitas, keuangan Negara diatur dan dikelola secara proporsional sesuai dengan arah strategi pembangunan dan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah dan melalui persetujuan dewan perwakilan tersebut.
- h. Asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan keuangan Negara dilakukan secara terbuka, dalam arti proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diketahui atau diawasi oleh rakyat melalui dewan perwakilan terkait. Dokumen anggaran dan pertanggungjawaban keuangan Negara merupakan dokumen publik.
- i. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara diperiksa oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri dari rakyat yang diatur dalam undang-undang. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada rakyat melalui dewan perwakilan terkait dan pemerintah. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan yang

telah diserahkan kepada dewan perwakilan merupakan dokumen publik. (Bahtiar, 2009:108-110).

Administrasi keuangan negara perlu mendapatkan perhatian khusus karena dengan dilaksanakannya pengelolaan administrasi yang baik mulai dari pemerintah pusat, dan daerah bahkan pada level yang paling rendah dapat meningkatkan kepercayaan publik, bahkan dengan administrasi keuangan yang baik berbagai manfaat lain akan diperoleh terutama menyangkut informasi mengenai keuangan pemerintah. Pengguna informasi keuangan pemerintah antara lain . a. Pemerintah, sebagai manajemen. b. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang diwakili oleh lembaga legislatif, perwakilan daerah dan majelis permusyawaratan rakyat. c. Pemeriksa. d. Kreditur seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Negara atau lembaga kreditur lainnya. (Bahtiar, 2009:13). Selanjutnya dijelaskan informasi dan laporan keuangan ini dapat dipergunakan untuk memprediksi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan negara, dapat pula digunakan untuk merencanakan alokasi belanja dan transfer, serta pembiayaan yang diperlukan.

Alokasi dana pemerintah menjadi isu yang sangat penting dewasa ini, bagaimana isu pemerataan pembangunan berhubungan dengan pengalokasian dana dari pemerintah. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah menjadi perhatian berbagai pihak. Menurut Ikhsan (2007:11.61) menyatakan : “Alasan utama pemberian alokasi dana oleh pemerintah pusat kepada pemda berkaitan erat dengan ketidakseimbangan antara

sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.” Hal tersebut selaras dengan otonomi daerah, dimana berbagai urusan yang pada masa lalu dilakukan atau dikelola oleh pemerintah pusat kini menjadi tanggungjawab dan dikelola oleh pemda. Tanggung jawab dan wewenang yang diberikan tersebut tentulah membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu alokasi dana pembangunan daerah lebih besar dari sebelum diberlakukannya otonomi daerah.

Undang-undang otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memuat misi desentralisasi, diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah, menurut Mardiasmo, (2009:25) manfaat tersebut adalah untuk :

- 1). Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.
- 2). Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Tujuan lain dari pengalokasian dana ke pemda adalah “Untuk mempengaruhi pola pembiayaan yang dianut oleh daerah agar standar pelayanan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat dapat dicapai” (Ikhsan, 2007:11.64). Standar pelayanan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat dapat melalui pemberian Subsidi (*Grant*), bantuan khusus (*Spesific grant*)

adalah “bentuk subsidi yang dananya telah diperuntukan bagi pembiayaan yang telah ditetapkan penggunaannya oleh pemerintah pusat”. (Ikhsan, 2007:11.74). Salah satu contoh bantuan khusus ini adalah pemberian dana BOS bagi sekolah-sekolah (SD-SMP) negeri dan swasta di seluruh Indonesia dengan tujuan agar dapat meringankan beban masyarakat dalam bidang pendidikan.

3. Pengawasan

Peranan dari manajemen dalam sebuah organisasi sangat penting, salah satu fungsi manajemen adalah Pengawasan. Pengawasan (*controlling*) menurut para pakar didefinisikan sebagai berikut :*“Controlling is the process of regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its plans”* (Earl P. strong dalam Brantas, 2009) sedangkan G.R.Terry (dalam Brantas;2009:189), mendefinisikan pengawasan sebagai berikut :

Controlling can be defined as the proses of determining what is to be accomplished that is the standard, what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard.

Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses sehingga hasil akhir diketahui. Dalam setiap kegiatan apalagi dalam hal pertanggungjawaban keuangan Negara, dibutuhkan pengawasan yang baik agar sasaran dari program pemerintah dapat tercapai sesuai dengan

standar yang ingin dicapai. Fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara antara lain untuk : “mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran, pemborosan, inefisiensi, salah urus maupun korupsi yang merugikan negara” (Ikhsan, 2007:12.1) berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kebocoran-kebocoran dan korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu, kurang optimalnya pemanfaatan dana serta pengelolaan dan pengurusan keuangan yang salah.

Pengawasan terkait erat dengan fungsi perencanaan karena berdasarkan rencana tersebutlah pengawasan dapat dilakukan atau rencana yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan, sejalan dengan hal tersebut Hasibuan *dalam* Brantas, (2009:189) menyatakan bahwa Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan, pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana, pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan dengan baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan atau penilaian dilakukan. Menurut Woelfel (*dalam* Ikhsan;2007,12.4) menyatakan bahwa Perencanaan menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, sedangkan pengawasan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut, Brantas, (2009:30) menyatakan dalam pengawasan terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu :

- Tetapkan ukuran-ukuran.
- Monitor hasil-hasil dan bandingkan dengan ukuran-ukuran.

- Perbaiki penyimpangan-penyimpangan.
- Ubah dan sesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan perubahan kondisi-kondisi.
- Berhubungan selalu selama proses pengawasan.

Objek pengawasan keuangan publik adalah anggaran negara (*budget*), oleh karena itu pengawasan keuangan publik sama dengan pengawasan anggaran. Ikhsan (2007:12.6) menyatakan :

Dinamakan pengawasan anggaran karena pengawasan keuangan publik menggunakan anggaran sebagai tolak ukur dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian pengawasan keuangan publik merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan budget atau anggaran apakah telah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak. Pengawasan dilakukan terhadap seluruh unit atau perangkat organisasi pemerintah dari level tertinggi sampai dengan level terendah, dari pusat hingga daerah, termasuk BUMN dan BUMD.

Pengawasan akan bermakna apabila tujuan dari pengawasan telah tercapai, tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pengawasan adalah :

- a. Pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efisien dan efektif;
- b. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas;
- c. Menimbulkan suasana saling percaya di dalam dan di luar organisasi;
- d. Meningkatkan akuntabilitas organisasi;
- e. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi; dan
- f. Mendorong terwujudnya *good corporate governance*.
(Ikhsan, 2007:12.11).

Manfaat pengawasan menurut Brantas, (2009:191) untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang obyektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara

pelaksanaan dengan perencanaanya. Menurut Abdurrahman (*dalam Safie;1997:83*) beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu :

- a. filsafat yang dianut bangsa tersebut.
- b. Agama yang mendasari seseorang tersebut.
- c. Kebijakan yang dijalankan.
- d. Anggaran pembiayaan yang mendukung.
- e. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya.
- f. Kemantapan koordinasi dalam organisasi.

Pengawasan dapat dilakukan di bidang keuangan (finansial) maupun pengawasan non keuangan (non-finansial). “Pengawasan non finansial memonitor aktivitas-aktivitas maupun program-program yang terkait dengan aspek finansial, yakni efektifitas, efisiensi, dan ekonomis.” (Ikhsan, 2007:12.11) selanjutnya dijelaskan :

Pengawasan organisasi digunakan untuk tujuan mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan, yang sering diukur dengan tingkat keuntungan yang diperoleh, tingkat pencapaian tujuan, perubahan struktur, rencana dan tujuan organisasi. Pengawasan operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi dari waktu ke waktu dengan menetapkan standar yang dapat digunakan untuk memonitor kinerja. (Ikhsan, 2007:12.11)

Pengawasan dapat dilakukan bertahap sesuai dengan waktu dan standar tertentu dalam proses operasional sebuah organisasi untuk melihat capaian yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, sehingga apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan dapat dilakukan perbaikan dengan segera. Dalam kaitanya dengan akuntabilitas publik

dalam proses pengelolaan negara Mardiasmo (2009:22) menyatakan sebagai berikut :

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

Bentuk-bentuk pengawasan diantaranya adalah pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan langsung dilakukan oleh pimpinan secara langsung di dalam organisasi atau dikenal dengan *bulid in control* (pengawasan melekat). “Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh pimpinan atau aparat melalui laporan-laporan yang diterimanya, pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian serta material” (Ikhsan, 2007:12.13). selanjutnya David Garnick (*dalam* Safiie;1997:83) mengemukakan tiga fase dalam pengawasan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : a.) Fase legislatif. b). Fase administratif. c). Fase dukungan. Mekanisme pengawasan keuangan publik perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama bagi penyelenggara pemerintahan atau birokrasi maupun bagi lembaga-lembaga pengawasan yang ada. Effendi, *dalam* Suara Karya (2003), menyatakan bahwa : “ Mekanisme pengawasan keuangan negara dapat dibedakan atas dua hal yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern meliputi pengawasan supervise

(*built in control*), pengawasan birokrasi serta pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawas intern. ”

Lebih lanjut dijelaskan “adapun pengawasan birokrasi yaitu pengawasan melalui sistem dan prosedur administrasi.” (Effendi, 2003). Prosedur yang sesuai akan mempermudah pengawasan terhadap anggaran negara, sistem yang baik dan bekerja sesuai dengan fungsi dan peranannya akan menjadi objek dari pengawasan birokrasi. Hal tersebut penting karena sistem yang tidak berjalan sesuai aturan yang ada akan menghambat proses pencapaian tujuan negara. Prosedur administrasi menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik dengan bukti-bukti tertulis yang sah dari pihak-pihak terkait. Pengawasan terhadap sebuah program mencakup keseluruhan perencanaan yang telah ditetapkan, pemeriksaan terhadap berbagai aspek yang ada dalam berbagai kebijakan pemerintah merupakan tuntutan dan keharusan dalam organisasi atau Negara. Pemeriksaan atau *auditing* dilakukan oleh pemeriksa intern atau pemeriksa ekstern organisasi. Akmal (2007) berpendapat Independensi pemeriksa intern terbatas hanya sampai obyek pemeriksaannya, sedangkan pemeriksa ekstern tidak terbatas. Lebih lanjut disebutkan beberapa perbedaan pemeriksaan intern dan ekstern sebagai berikut:

1. Tujuan pemeriksaan keuangan oleh pemeriksa ekstern adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan yang akan diberikan kepada semua pihak, sedangkan pemeriksaan intern juga mempunyai tujuan yang sama, namun penggunaannya hanya

- terbatas bagi manajemen perusahaan dan bagi pemeriksa ekstern.
2. Penugasan yang dominan untuk pemeriksaan intern adalah jenis pemeriksaan operasional sedangkan untuk pemeriksa ekstern adalah jenis pemeriksaan atas laporan keuangan.
 3. Pada pemeriksaan intern pemeriksaannya terdiri dari berbagai disiplin ilmu, sedangkan pada pemeriksaan ekstern pemeriksanya kebanyakan akuntan.
(Akmal, 2007:2).

Pemeriksaan intern berguna agar berbagai prosedur dan tahapan pelaksanaan program berjalan dengan baik, salah satu tujuan pemeriksaan intern menurut Akmal (2007) adalah untuk menentukan tingkat ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan perundang-undangan. Sehubungan dengan pengendalian intern dan ekstern tersebut, keduanya akan saling melengkapi guna pengembangan program dan organisasi pada umumnya. Sementara itu peran pengawas internal menurut Ikhsan (2007:12.15) mencakup beberapa hal, yaitu : Peningkatan kualitas keandalan ketepatan waktu informasi pertanggungjawaban pengelolaan organisasi, dan kepastian terwujudnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi. Pengawas internal menekankan pada pemberian bantuan bagi manajemen untuk dapat mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait inefisiensi dan berbagai potensi kegagalan dalam berbagai program. Sementara itu cirri-ciri pengendalian manajemen yang efektif menurut Akmal (2007:25) adalah tujuannya jelas, dibangun untuk tanggungjawab bersama serta biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan.

Pemeriksaan oleh para auditor akan memberikan kontribusi yang besar bagi berbagai pihak terutama bagi pihak manajemen organisasi. Berikut ini pendapat dari Robert, Dearden & Bedford *dalam* Maulana (1992) menyatakan:

Auditor intern membantu usaha-usaha untuk mengembangkan dan memadukan pengendalian akuntansi perencanaan manajemen sampai pengendalian akuntansi dan auditing terintegrasi sebagai bagian dari proses pengendalian manajemen. Untuk melakukan hal ini mungkin diperlukan auditor ekstern guna mengaudit bukan hanya kesesuaian dengan standar akuntansi, melainkan juga efisiensi dan efektivitas perencanaan, pengorganisasian, dan unjuk kerja organisasi. Usaha lainnya juga telah dilakukan untuk menyesuaikan pengendalian akuntansi intern dengan pengendalian tugas.
(Robert, Dearden & Bedford *dalam* Maulana, 1992:27)

Lebih lanjut Maulana menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen haruslah didesain untuk memudahkan perencanaan bagi pelaksanaan strategi, untuk memotivasi para manajer guna mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan untuk mengembangkan informasi guna mengevaluasi prestasi dalam mencapai tujuan. Harold Koontz dan Cyril O' Donnel, mengemukakan asas-asas pengawasan yaitu :

1. Asas tercapainya tujuan (*Principle of assurance of objective*).
2. Asas efisiensi dan pengawasan (*Principle of efficiency of control*).
3. Asas tanggung jawab pengawasan (*Principle of control responsibility*).
4. Asas pengawasan terhadap masa depan (*Principle of future control*).
5. Asas pengawasan langsung (*Principle of direct control*).
6. Asas refleksi rencana (*Principle of reflection plans*).
7. Asas penyesuaian dengan organisasi (*Principle of organization suitability*).

8. Asas pengawasan individu (*Principle of individual of control*).
 9. Asas standar (*Principle of standard*).
 10. Asas pengawasan terhadap strategis (*Principle of strategic point control*).
 11. Asas kekecualian (*The exception principle*).
 12. Asas pengawasan fleksibel (*Principle of flexibility of control*).
 13. Asas peninjauan kembali (*Principle of review*).
 14. Asas tindakan (*Principle of action*).
- (Brantas, 2009:191-193)

Dengan adanya asas-asas pengawasan di atas diharapkan pihak pengawas memiliki acuan dalam melaksanakan tugasnya, di sisi lain dengan adanya asas-asas tersebut akan sangat membantu berbagai pihak dalam menjalankan berbagai program yang telah direncanakan agar dapat berjalan dengan baik. Berbagai hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengawasan diantaranya adalah sifat dan waktu pengawasan, hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dalam hal ini pihak intern organisasi maupun pihak luar organisasi. Adapun Sifat dan waktu pengawasan dapat dibedakan menjadi :

- a. *Preventive control*, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan.
- b. *Repressive control*, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
- c. Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki.
- d. Pengawasan berkala, adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
- e. Pengawasan mendadak (sidak), adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.

- f. Pengamatan melekat (*waskat*), adalah pengawasan yang dilakukan secara *integrative* mulai dari sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan dilakukan.
(Brantas, 2009:198)

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa didalam melaksanakan pengawasan hal-hal yang mutlak dijadikan pedoman agar pengawasan berjalan dengan efektif dan efisien adalah asas-asas pengawasan yang berlaku, sifat dan waktu pengawasan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengawasan adalah penyesuaian obyek atau tujuan yang ingin diawasi dengan kebutuhan organisasi sebagai dasar dan acuan untuk menentukan berbagai tindakan atau kebijakan yang akan diambil. Jenis-jenis pengawasan yang menjadi sasaran pengawasan mencakup pengawasan atas :

- a. Pengawasan karyawan, yang ditujukan kepada hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan karyawan. b. Pengawasan keuangan, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan. c. Pengawasan produksi, yang ditujukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar dan rencananya. d. Pengawasan waktu, yang ditujukan kepada penggunaan waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan sesuai atau tidak dengan rencana. e. Pengawasan teknis, yang ditujukan kepada hal-hal yang bersifat fisik, yang berhubungan dengan tindakan dan teknis pelaksanaan. f. Pengawasan kebijaksanaan, yang ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijakan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan. g. Pengawasan penjualan, yang ditujukan untuk mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang telah ditetapkan. h. Pengawasan inventaris, yang ditujukan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan/organisasi masih ada semuanya atau ada yang hilang. i. Pengawasan pemeliharaan, ditujukan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan dan kantor dipelihara dengan baik

atau tidak, dan apabila ada yang rusak apakah masih dapat diperbaiki atau tidak. (Brantas, 2009:193-194)

b. Monitoring

Monitoring diartikan sebagai “proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program/memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.” (Suzanne, 2009). Menurut Prasetyo (2009), monitoring diartikan sebagai : “Kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaannya secara mantap, teratur dan terus menerus dengan cara mendengar, melihat, dan mengamati, serta mencatat keadaan serta perkembangan program tersebut.” Definisi monitoring menurut Casely & Kumar (1987) , adalah sebagai berikut :

Monitoring adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan. Monitoring adalah kegiatan proyek yang integral, bagian penting dari praktek manajemen yang baik dan karena itu merupakan bagian yang integral dari manajemen sehari-hari.

Sementara Akbar (2011), mengartikan monitoring sebagai berikut :

Monitoring (pemantauan) merupakan prosedur analisis kebijakan yang akan digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Monitoring juga merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan. Jadi, monitoring

merupakan cara untuk membuat pernyataan yang sifatnya penjelasan (*designative claims*) tentang kebijakan di waktu lampau maupun sekarang. Monitoring menghasilkan kesimpulan yang jelas selama dan setelah kebijakan diadopsi serta diimplementasikan (*ex postfacto*)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa monitoring merupakan sebuah kegiatan yang mampu menghasilkan gambaran secara menyeluruh terhadap program yang sudah ataupun sedang dilaksanakan, perkembangan pelaksanaan program tersebut terus diawasi dan diidentifikasi secara rutin, baik menyangkut perencanaan komponen program, waktu, dan pelaksanaan program dan kemajuan yang telah dicapai. Kegunaan monitoring menurut William Travers Jarome dalam Prasetyo (2009), adalah sebagai berikut :

1. Monitoring yang digunakan untuk memelihara dan membakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menekan biaya pelaksanaan program.
2. Monitoring yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan gangguan, pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan.
3. Monitoring yang digunakan langsung untuk mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil dengan kepentingan para pemakai hasil dengan kemampuan tenaga pelaksana.
4. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh staf atau bawahan.
5. Monitoring yang digunakan untuk mengukur penampilan tugas pelaksana.
6. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program.

7. Monitoring yang digunakan untuk mengetahui berbagai ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga.
8. Monitoring yang digunakan untuk memotivasi keterlibatan para pelaksana.

Monitoring berkaitan erat dengan supervisi dan evaluasi program. UNESCO (1982) dalam Prasetyo (2009), menyatakan ada lima kaitan dan perbedaan antara monitoring dan evaluasi adapun kaitan tersebut adalah sebagai berikut .

- a. Fokus monitoring adalah program yang sedang dilaksanakan, bukan pada konteks kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaksana program. Sedangkan evaluasi sering dilakukan sejak perencanaan program.
- b. Monitoring menitikberatkan pada aspek kuantitatif dalam pelaksanaan program yang dapat menjadi bahan untuk kegiatan evaluasi. Evaluasi dapat melengkapi hasil monitoring dengan data tambahan yang diperlukan sesuai dengan tujuan evaluasi yang mengarah pada aspek kualitatif. Monitoring berhubungan erat dengan dimensi kuantitatif tentang efektifitas program seperti banyaknya output program.
- c. Monitoring mencakup usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung program.
- d. Kontribusi yang dapat dimanfaatkan dengan segera.
- e. Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Monitoring dapat dilakukan setelah sebuah kebijakan dilaksanakan dengan maksud melihat dampak atau perubahan dari sebuah kebijakan yang dijalankan. Program-program yang ada akan dipelajari dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan. Agar dampak dan tujuan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat

semakin baik dapat dilakukan dengan menambah masukan/input berupa sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi.

c. Evaluasi

Monitoring sering dipadankan dengan kata evaluasi, hal ini karena kedua hal tersebut mengarah kepada pengawasan dan penilaian dalam arti yang lebih khusus yakni pengawasan dan penilaian terhadap sebuah program atau kebijakan. Kebijakan publik dalam implementasinya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, pada paparan sebelumnya pembahasan tentang apa itu monitoring telah dijabarkan dengan berbagai teori dan definisi, selanjutnya penulis akan memaparkan apa itu evaluasi berdasarkan pendapat para ahli dan konsep-konsep yang berkaitan dengan evaluasi. Menurut Prasetyo (2009), evaluasi adalah :

proses untuk menentukan nilai atau harga dari sebuah program. Kursus, atau prakarsa lainnya menuju pada tujuan akhir yaitu menghasilkan keputusan mengenai penerimaan, penolakan atau perbaikan inovasi. Evaluasi adalah istilah yang menyeluruh, sering menggunakan data penilaian sebagai tambahan terhadap jenis data lainnya yang dijadikan sumber.

Pengertian evaluasi menurut Suzanne (2009), adalah “penggunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematis menginvestigasi program, menilai kontribusi program terhadap

perubahan (*goal/objektif*) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi)”. Definisi lain dari Evaluasi menurut evaluationwiki.org. adalah “As defined by the American Evaluation Association, evaluation involves assessing the strengths and weaknesses of programs, policies, personnel, products, and organizations to improve their effectiveness.” Evaluasi didefinisikan oleh Casely & Kumar (1987), sebagai “penilaian berkala terhadap relevansi, penampilan, efisiensi dan dampak proyek di dalam konteks tujuan yang sudah ditetapkan. Evaluasi biasanya menggunakan perbandingan yang membutuhkan informasi dari luar proyek - tentang waktu, daerah atau populasi”. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan evaluasi adalah sebagai berikut :

- Evaluasi memerlukan desain studi/penelitian.
 - Evaluasi terkadang membutuhkan kelompok kontrol atau kelompok pembanding.
 - Evaluasi melibatkan pengukuran seiring dengan berjalannya waktu.
 - Evaluasi melibatkan studi/penelitian khusus.
- (Suzanne, 2009).

Adapun tujuan dari evaluasi diantaranya : “Tujuan dari evaluasi program berfungsi sebagai pengarah kegiatan evaluasi dan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas

kegiatan evaluasi program.” (Prasetyo, 2009). Tujuan dari evaluasi juga dinyatakan sebagai berikut :

Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus, untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan ekonomis, dan untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek-aspek tertentu.
(kojingtonolog.wordpress.com,2010)

Jenis evaluasi di bagi menjadi 2 (dua) yakni evaluasi sumatif dan evaluasi formatif, penjelasan kedua jenis evaluasi tersebut adalah sebagai berikut : “Formatif menyediakan informasi untuk meningkatkan atau memperbaiki produk atau proses, sedangkan evaluasi sumatif menyediakan efektifitas jangka pendek atau informasi dampak jangka panjang untuk menentukan apakah akan mengadopsi atau tidak suatu proses atau produk.” Sementara itu Stufflebeam membedakan evaluasi menjadi *Proactive evaluation* yang digunakan untuk melayani pemegang keputusan dan *Retroactive evaluation* yang digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban (Prasetyo, 2009). Adapun fungsi evaluasi program menurut Scriven (1967) adalah sebagai berikut:

- a). Fungsi Formatif yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk, dsb).
- b). Fungsi sumatif yaitu evaluasi dipakai untuk

pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat. (Kojingtechnolog. Wordpress.com, 2010).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria-kriteria penilaian suatu objek adalah :

- Kebutuhan, ideal, dan nilai-nilai.
- Penggunaan yang optimal dari sumber-sumber dan kesempatan.
- Ketepatan efektivitas program.
- Pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dan tujuan penting lainnya. (Prasetyo, 2009).

B. Penyaluran Dana BOS

Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010 mendefinisikan BOS sebagai program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara umum tujuan dari program ini adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Agar program ini dapat berjalan dengan baik ditetapkanlah mekanisme penyaluran, pengadministrasian, serta pelaporan sedemikian rupa seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun 2010.

Jadwal dan mekanisme penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah penerima telah ditetapkan dengan jelas dalam buku panduan BOS, ada 2 (dua) tahap penyaluran dana BOS, tahap I adalah penyaluran Dana dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah, dan tahap II adalah penyaluran Dana dari Kas Umum Daerah ke Sekolah.

Tahapan-tahapan penyaluran yang ada adalah sebagai berikut :

1. Tahap I Penyaluran Dana dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah, meliputi :

- a. Penyaluran BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. BOS disalurkan secara triwulan (tiga bulanan), yaitu: triwulan I (Januari – Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September), dan Triwulan IV (Oktober-Desember).
- c. Penyaluran Triwulan pertama, kedua, ketiga adalah masing-masing $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari alokasi sementara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Penyaluran Triwulan keempat sebesar selisih antara penetapan alokasi prognosa defenitif BOS dengan jumlah dana yang telah disalurkan dari Triwulan pertama sampai dengan Triwulan ketiga.

Untuk Tahap II, Penyaluran Dana dari Kas Umum Daerah ke Sekolah Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA setiap triwulan sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan.
- b. KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D.
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan mentransfer dana BOS yang diterima dari BUD langsung ke PBPP untuk pembayaran kegiatan BOS di masing-masing sekolah.
- d. Proses penyelesaian penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada poin a,b,c di atas paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- e. PBPP melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterima per Triwulan dengan melampirkan rekap SPJ dan dokumen bukti pertanggungjawaban yang sah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan paling lama 10 hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwulan.
- f. Realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan jumlah dan bukti-bukti yang sah dicatat dalam BKU oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA-SKPD pendidikan berikut pengelompokan realisasi anggaran per jenis belanja.

- g. Pencairan triwulan kedua dan seterusnya diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan poin a sampai dengan d di atas dengan memperhatikan perubahan alokasi per sekolah yang ditetapkan oleh Kemendiknas.
- h. SKPD pendidikan melaporkan kekurangan atau kelebihan dana BOS per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah pada poin e di atas kepada Kemendiknas untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah.

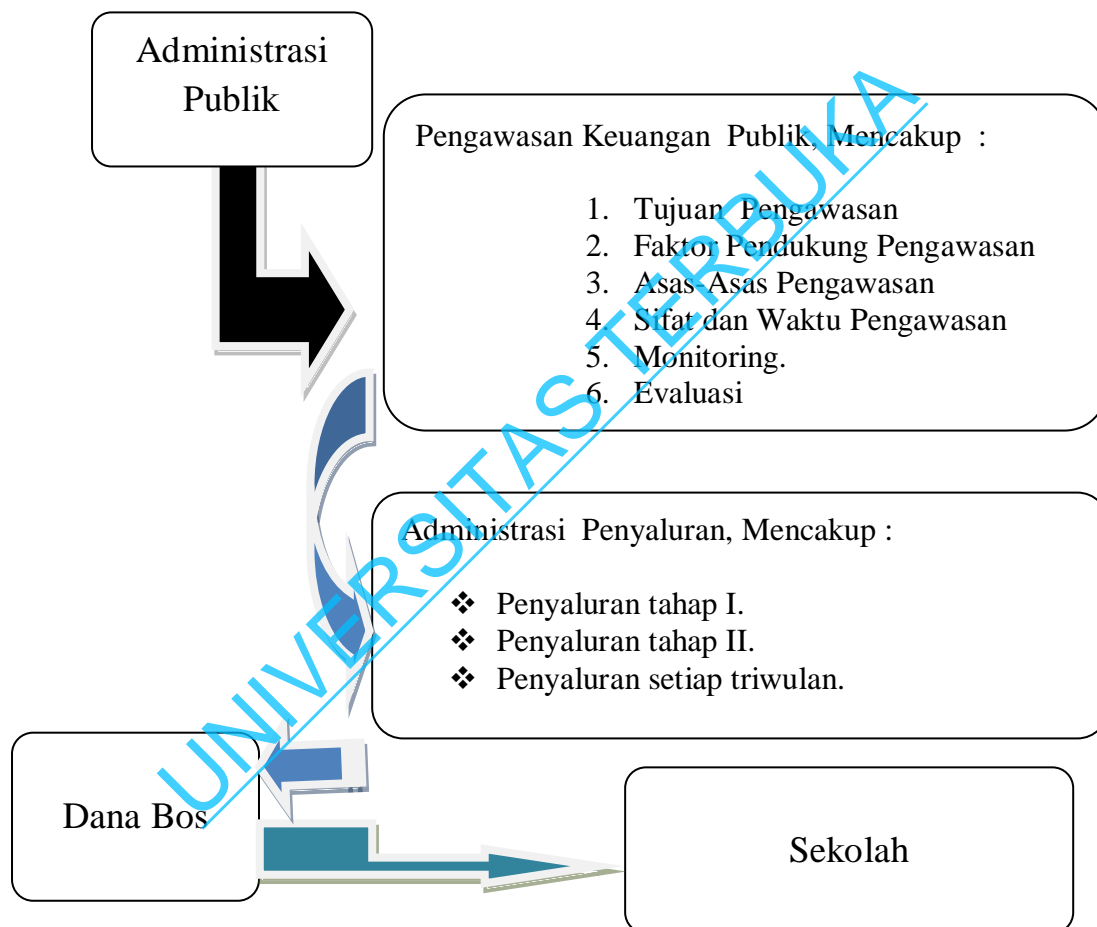
(Sumber : Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).

UNIVERSITAS TERBUKA

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka penulis menyusun kerangka berpikir sebagai berikut :

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, sebagai instansi yang terkait langsung dalam memonitor dan mengevaluasi berbagai administrasi yang diperlukan dalam penyaluran dana BOS ke sekolah penerima di Kabupaten Sintang. Metode deskriptif menurut Singarimbun (1989:4), merupakan penelitian yang biasanya mempunyai dua tujuan, yang pertama adalah untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekwensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tersebut. Guna mendapatkan data dan informasi yang handal, penulis menggunakan metode Triangulasi, Triangulasi dalam penelitian kualitatif dipaparkan sebagai berikut :

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. (Raharjo, 2010).

Menurut Norman.K. Denkin, triangulasi ini meliputi 4 (empat) hal yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Triangulasi metode dipaparkan sebagai berikut :

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. (Raharjo, 2010).

Sementara itu, untuk triangulasi sumber data, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Triangulasi data ini dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan banyak sumber data. Triangulasi dengan sumber lain berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

- Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi
- Membandingkan dengan apa yang dikatakan secara pribadi dengan apa yang dikatakan di depan umum.
- Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dari berbagai lapisan masyarakat baik tingkat pendidikan, satatus pekerjaan misalnya.
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen lainnya.

(Wordpress.com, 2010)

Penggunaan Sumber data dan informasi yang berbeda dimaksudkan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dari permasalahan yang ada terkait pengawasan dan penyaluran dana BOS di Kabupaten Sintang. Adapun pihak yang menjadi sumber informasi dan penyedia data adalah pihak sekolah dalam hal ini Kepala SMP, Guru, dan Komite sekolah serta Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan gambaran yang semakin nyata tentang bagaimana pengawasan dana BOS di Kabupaten Sintang.

B. Lokasi Penelitian

Dengan mempertimbangkan biaya, waktu, dan tenaga, penelitian dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan SMP Negeri 1 Ambalau Kecamatan Ambalau serta SMP Negeri 1 Kayan Hulu Kecamatan Kayan Hulu sebagai penerima dana BOS. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis memilih Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagai lokasi penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi terkait penyaluran dana BOS ke sekolah penerima, administrasi apa saja yang harus diserahkan pihak sekolah penerima agar penyaluran dapat berjalan dengan baik dan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan dan monitoring serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Sedangkan untuk sekolah penerima dana BOS diharapkan diperoleh data dan informasi bagaimana pengadministrasian dana BOS di sekolah penerima, bagaimana

pengawasan dan monitoring serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait sehubungan dengan pengelolaan dana BOS di sekolah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada paparan sebelumnya telah dibahas mengenai metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data, yakni dengan menggunakan pendekatan Triangulasi, secara khusus triangulasi metode, sehingga untuk mendapatkan data-data yang valid peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara :

- a. Studi dokumenter dilakukan untuk memperoleh data-data skunder dan memperkaya teori-teori serta untuk melihat keterkaitan antara sumber-sumber data dan guna memperoleh data yang baik. Studi Kepustakaan dilakukan sebagai upaya untuk memperkaya teori dalam rangka merumuskan pemahaman teoritis terhadap fenomena yang akan diteliti (Effendi 1989:23)
- b. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan jelas, serta untuk menambah pemahaman terhadap suatu fenomena yang terjadi, wawancara kepada Tim Penanggungjawab Program BOS di Kabupaten Sintang diharapkan mampu memberikan penjelasan secara lebih menyeluruh terhadap berbagai permasalahan yang ada terutama dalam hal pengawasan dan administrasi penyaluran dana BOS. “Dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan

dialami seseorang/subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian”. (Faisal 1990:61).

- c. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung dan menyeluruh tentang obyek penelitian yang ada. Observasi dilakukan dengan kegiatan pengamatan fenomena yang secara langsung berhubungan dengan sasaran yang diamati dan hanya membatasi pada persoalan yang ditanyakan (Thoha, 1989).

D. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara yang berupa susunan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan aspek-aspek yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikelompokkan sedemikian rupa sesuai dengan narasumber yang ada untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Guna mendukung kelancaran pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan alat bantu dokumentasi berupa kamera dan alat foto copy yang akan digunakan untuk menyimpan dan memperbanyak/menggandakan data-data yang relevan.

E. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah penerima dana BOS, guru dari sekolah yang diteliti, dan anggota komite sekolah

dari masing-masing sekolah yang diteliti. Subyek penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pandangan yang semakin baik terhadap permasalahan yang ada, hal ini sejalan dengan pendekatan yang digunakan yakni triangulasi sumber data seperti yang telah dipaparkan pada bagian awal Bab ini. Subyek penelitian yang diambil dari berbagai kalangan dan kepentingan diharapkan semakin memperkaya pemahaman penulis terhadap berbagai situasi dan permasalahan yang ada, berikut aspek-aspek yang menyertainya.

F. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh akan dikumpulkan dan di analisis menggunakan analisis kualitatif dan selanjutnya akan dilakukan interpretasi guna memecahkannya. Menurut Bogdan dan Bilken, analisis data adalah “proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan, yang kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman “. (Irawan, 2007:5.20). Sedangkan penulisan kualitatif menurut Santana (2007:68) adalah :

Kerangka dimulai dengan pokok-pokok (sub pokok) fenomena (berupa fakta-fakta atau data) yang didapat saat melakukan prariset. Kemudian, mengerangkakan asumsi-asumsi teoritik dan literature yang dipakai untuk membahas berbagai temuan gejala tersebut. Berbagai fakta dan data itu lalu dibahas. Dan, coba diasumsikan ke dalam simpulan-simpulan tertentu.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Keadaan Umum Kabupaten Sintang

Sebagai pengantar dalam menguraikan berbagai temuan dan pembahasan yang ada, sebelumnya penulis akan menggambarkan secara umum lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sintang tepatnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Letak Kabupaten Sintang secara Geografis adalah pada $1^{\circ}05'$ Lintang Utara serta $0^{\circ}46'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}50' - 113^{\circ}20'$ Bujur Timur. Adapun luas Kabupaten Sintang adalah 21.635 Km^2 . Kabupaten Sintang adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Batas-batas Administratif Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kapuas Hulu dan Serawak.
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Melawi dan Kalimantan Tengah.
3. Sebelah Barat : Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi.
4. Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Tengah dan Kapuas Hulu.

(Sumber : Sintang.go.id. 2011).

Pada masa pemerintahan Belanda, sekitar tahun 1936 daerah Sintang merupakan daerah *landschop* di bawah nanungan pemerintahan

Government. Landschop ini dibagi menjadi 4 (empat) *onderafdeling* yang dipimpin oleh *controleur* atau *gesagkekber*, yaitu : *Onderafdeling Sintang*, *Onderafdeling Melawi*, *Onderafdeling Semitau* dan *Onderafdeling Boeven* Kapuas. Kerajaan Sintang didirikan oleh Demang Irawan (Jubair I). Pemerintahan *Landschop* berakhir pada tahun 1942 saat Jepang mengambil alih tampuk pemerintahan. Pada masa pemerintahan Jepang, struktur pemerintahan tidak berubah hanya sebutan wilayah yang berubah menggunakan bahasa Jepang.

Pada saat pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada pihak Indonesia, *afdeling* Sintang diganti dengan Kabupaten Sintang. *Onderafdeling* menjadi dengan nama Kewedanaan dan Residen diganti dengan Bupati. Tanggal 27 Oktober 1956 dilaksanakan pelantikan keanggotaan DPRD peralihan Kabupaten Sintang. Sesuai dengan Kepres Nomor 6 tahun 1959 tanggal 6 Nopember 1959, azas dekonsentrasi dan desentralisasi sebagai realisasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 dihimpun kembali ke dalam satu tangan Bupati Kepala Daerah, yang dibantu oleh Badan Pemerintahan harian, selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 tahun 1966 tanggal 1 Pebruari 1966 pemerintahan di seluruh Indonesia mulai diarahkan dan disempurnakan. Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang pada tahun 2005 dibagi menjadi 14 KeKepala Dinasan, 6 Kelurahan dan

183 Desa. Kepala Dinas yang terluas adalah Kepala Dinas Ambalau dengan luas 29,52 persen Kabupaten Sintang.

2. Gambaran Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang merupakan instansi yang berwenang dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan program-program yang berkenaan dengan bidang pendidikan di Kabupaten Sintang. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang adalah : “Mewujudkan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan, berazaskan iman dan taqwa”. sedangkan Misinya adalah : Meningkatkan layanan pendidikan, meningkatkan fungsi manajemen pendidikan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan *stakeholders* pendidikan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 1 September 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris Dinas Pendidikan.
- 3) Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas :
 - a). Seksi Kurikulum TK, SD, dan SLB.
 - b). Seksi Tenaga Teknis TK, SD, dan SLB

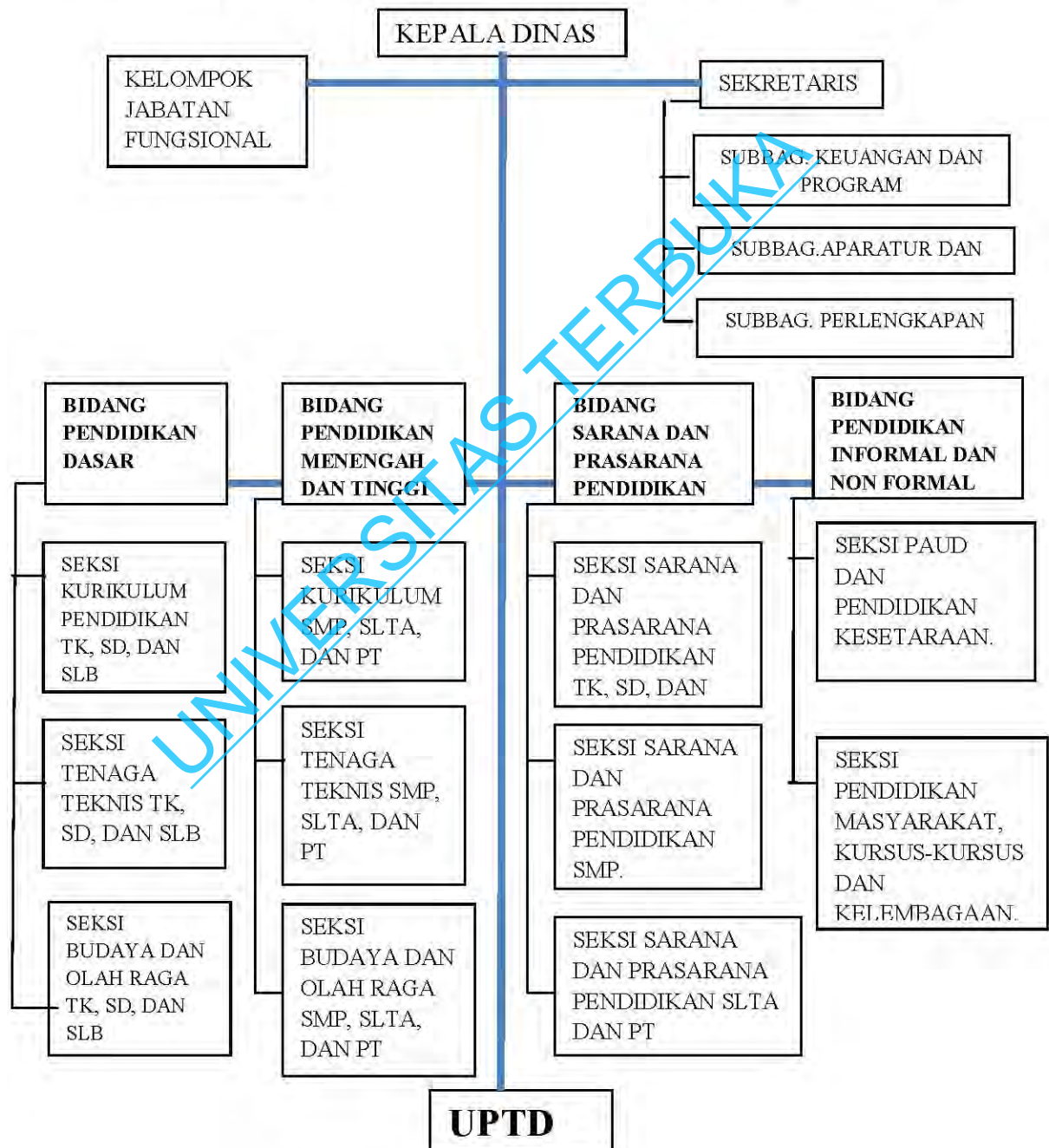
- c). Seksi Budaya dan Olah Raga TK, SD, dan SLB.
- 4) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri atas :
 - a). Seksi Kurikulum SMP, SLTA, dan PT.
 - b). Seksi Tenaga Teknis SMP, SLTA, dan PT
 - c). Seksi Budaya dan Olah Raga SMP, SLTA, dan PT
- 5) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan.
 - a). Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan TK, SD, dan SLB.
 - b). Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP.
 - c). Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SLTA dan PT.
- 6) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - a). Seksi PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.
 - b). Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus-kursus dan Kelembagaan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Adapun Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut :

BAGAN 3.1.

Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 2011

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Pendidikan Formal dan Informal, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Bidang Monitoring dan Pengembangan;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pendidikan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
- d. Pelaksanaan penetapan kebijakan operasional pendidikan kota sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan standar Nasional Pendidikan;
- f. Pelaksanaan pemberian kajian teknis perijinan dan/atau rekomendasi pendirian serta pencabutan izin Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Satuan Pendidikan Internasional sesuai dengan kewenangannya;
- h. Pelaksanaan penyediaan system informasi manajemen pendidikan kota;
- i. Pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan;

- j. Pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- k. Pelaksanaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan;
- l. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan skala kota;
- m. Pelaksanaan supervisi dan fasilitas satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
- n. Pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- o. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis atau rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan dibidang Pendidikan;
- p. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD;
- q. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
- r. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan;
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang didukung oleh personil-personil yang terdiri atas PNS

dan tenaga honorer, jumlah PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang adalah sebanyak 59 orang dan 11 orang tenaga honorer.

3. Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta

Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sintang tersebar di 14 kecamatan yang ada, jumlah sekolah untuk tiap jenjang adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1.
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sintang
Keadaan Tahun 2011.

No	Jenjang	Jumlah sekolah
1.	TK	81
2.	SD	389
	MI	9
3.	SMP	91
	MTS	9
4.	SMA	26
	MA	4
5.	SMK	12
JUMLAH		621

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 2011.

4. Jumlah Penerima Dana BOS

Tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, disamping itu program ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT Negeri wajib

menerima dana BOS, oleh sebab itu sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. Untuk sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.

Penerima dana BOS di Kabupaten Sintang adalah siswa SD dan SMP Negeri dan Swasta, untuk jenjang SD sebanyak 389 sekolah penerima dengan jumlah siswa penerima sebanyak 61.496 orang, dan jenjang SMP sebanyak 91 sekolah penerima, dengan jumlah siswa penerima sebanyak 16.428 orang. Jumlah Dana BOS untuk masing-masing siswa per tahun adalah :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| a. SD/SDLB di Kota | : Rp. 400.000,-/Siswa/tahun. |
| b. SD/SDLB di Kabupaten | : Rp. 397.000,-/Siswa/tahun. |
| c. SMP/SMPLB/SMPT di Kota | : Rp. 575.000,-/Siswa/tahun. |
| d. SMP/SMPLB/SMPT di Kabupaten | : Rp. 570.000,-/Siswa/tahun. |

Biaya pendidikan meliputi 3 (tiga) jenis pembiayaan, yaitu Biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. Seluruh sekolah yang menerima dana BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk sekolah negeri yang berkategori RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI

(Sekolah Bertaraf Internasional) diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan diketahui oleh komite sekolah. Pemda harus berperan aktif untuk ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah sehingga tercipta prinsip pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

B. Pengawasan BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Sebelum memaparkan hasil penelitian mengenai pengawasan dana BOS di Kabupaten Sintang, penulis akan memaparkan beberapa informasi terkait pelaksanaan Program BOS di Kabupaten Sintang, untuk penggunaan dana BOS dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, terdapat larangan dan ketentuan khusus dalam penggunaan dana BOS yang tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Berdasarkan ketentuan yang ada, pada tiap tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat sampai pada tingkat Pemerintah Daerah dibentuk Tim Manajemen BOS, di Kabupaten Sintang Tim Manajemen terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Tim yang dijabat oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, dan 3 (tiga) orang anggota yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Bidang SD, dan 1 (satu) orang Kepala Bidang SMP, serta 1 (satu) orang koordinator pengawas.

Tim Manajemen BOS Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan Format Lembar Kerja Individu Sekolah/LKIS (Format BOS-01A dan BOS-01B);

- b. Menetapkan alokasi dana BOS per sekolah untuk sekolah swasta;
- c. Melakukan sosialisasi kepada sekolah;
- d. Mempersiapkan DPA-SKPD/PPKD;
- e. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah;
- f. Menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS di kabupaten/kota dari sumber APBD;
- g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dan pengelolaan dan pelaporan BOS;
- h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- i. Melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
- j. Mengirimkan laporan pelaksanaan program BOS ke Bupati/Walikota dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kemendiknas.
- k. Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional.
- l. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- m. Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat Kabupaten/Kota.

Pada tingkat sekolah juga di bentuk tim yang terdiri atas 1 (satu) orang penanggungjawab yakni Kepala Sekolah (sekaligus sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran/PBPP), 2 (dua) orang anggota yang terdiri atas 1 (satu) bendahara BOS sekolah dan 1 (satu) orang unsur orang tua di luar

komite sekolah, dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan. Tugas dan tanggungjawab dari tim sekolah adalah :

- a. Mengisi dan menyerahkan LKIS ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- b. Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
- d. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;
- e. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS di papan pengumuman sekolah (Format BOS-02).
- f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RAPBS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Format BOS-K1).
- g. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Ketua Komite Sekolah (Format BOS-03);
- h. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah;
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. Menyampaikan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota;
- k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Format BOS-04).

Tata tertib pengelolaan program BOS pada tingkat sekolah meliputi beberapa hal yaitu, sekolah tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa, hal ini tidak diperkenankan karena akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima oleh sekolah. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggungjawab, guna pencitraan publik yang tertib dan bersih, selanjutnya pihak sekolah harus mengumumkan setiap pembelian barang dan harga yang dilakukan komite sekolah di papan pengumuman dan harus ditandatangani oleh komite sekolah, hal ini terkait transparansi dan partisipasi masyarakat atau pemberdayaan warga sekolah. Selanjutnya menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport. Pihak sekolah harus bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terkait pengelolaan dan penggunaan dana BOS maupun dana dari sumber lain, sekolah dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan hal ini termuat dalam Peraturan Mendiknas nomor 2 Tahun 2008 pasal 11.

Beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, setiap pengelola pendidikan harus memperhatikan:

- a. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.

- b. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin yang putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
- c. Anak lulusan setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP.
- d. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian pula bila diidentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
- e. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
- f. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak ada intimidasi bagi yang tidak menyumbang.

Program BOS mendukung implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dimana terkandung unsur pemberdayaan sekolah melalui kewenangan (otonomi), memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk dapat mengelola sumber daya sekolah dengan optimal, mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Dalam pengelolaan dana BOS, warga sekolah dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah mengelola dana secara profesional, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan, BOS harus menjadi sarana yang mampu meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka meningkatkan akses, mutu, dan manajemen sekolah. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 (empat) tahunan, menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dimana BOS menjadi bagian integral dalam RKAS tersebut dan RKAS tersebut harus disetujui dalam rapat dewan pendidik dengan memperhatikan pertimbangan komite sekolah selanjutnya harus disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.

Guna mendapatkan informasi yang berimbang dan menyeluruh tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terhadap sekolah penerima dana BOS, penulis juga melakukan wawancara kepada narasumber dari sekolah, yakni Kepala SMP Negeri 1 Ambalau dan Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu, penulis juga mewawancarai guru, yakni Guru SMP Negeri 1 Ambalau dan Guru SMP Negeri 1 Kayan Hulu. Sedangkan untuk perwakilan dari masyarakat dipilih anggota Komite Sekolah SMP Negeri 1 Kayan Hulu dan anggota Komite Sekolah SMP Negeri 1 Ambalau. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid dan berimbang dari pihak-pihak yang terkait. Berikut gambaran umum SMP Negeri 1 Ambalau dan SMP Negeri 1 Kayan Hulu.

Tabel. 3.2.

Gambaran Umum SMP yang menjadi Narasumber

No.	Nama sekolah	Alamat	Nama Kepala Sekolah	Jumlah guru		Jumlah siswa
				PNS	GTT	
1.	SMP Negeri 1 Ambalau	Ng. Kemangai Ambalau	Samsurizal, S.Sos	7	6	374
2.	SMP Negeri 1 Kayan Hulu	Jl. Topan Ng. Tebidah	Wasli, M.Pd	6	11	467

Sumber : - Kepala SMPN 1 Ambalau, 2011.
 - Kepala SMPN 1 Kayan Hulu, 2011.

Penyelenggaraan administrasi publik yang baik tentu ditunjang oleh pengawasan yang baik pula, seperti yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya bahwa peranan pengawasan terhadap Dana BOS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang maupun oleh instansi atau pihak-pihak yang terkait merupakan salah satu cara agar dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan dana BOS bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar, dan bentuk penyelewengan lainnya. Sehubungan dengan hal

tersebut, untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terhadap program BOS di Kabupaten Sintang, maka penulis akan memaparkan hasil wawancara dan data-data yang berhubungan dengan pengawasan tersebut. Sehubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan Provinsi bentuk pengawasan biasanya melalui angket ataupun kuesioner dan selanjutnya langsung ke sekolah-sekolah penerima, biasanya dilakukan pada akhir tahun.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terhadap pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Ambalau adalah dalam bentuk pengawasan administrasi dan pengawasan juga dilakukan dengan melihat langsung ke sekolah untuk mengetahui kondisi atau hasil yang telah dicapai, pengawasan juga dapat dilakukan dengan menghadiri kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS. Sehubungan dengan hal tersebut Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu menyatakan : “Pengawasan berbentuk sosialisasi dan pembinaan terhadap sekolah mengenai penggunaan dana BOS yang tepat waktu, tepat penggunaan dan sasaran sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan” (Wawancara Tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.15 Wib). Menanggapi pertanyaan penulis instansi mana saja yang sudah melakukan pengawasan dana BOS di Kabupaten Sintang, pihak Dinas Pendidikan menyatakan bahwa pada tahun 2010 pengawasan telah dilakukan oleh BPKP, dan untuk tahun 2011 pihak Tim Manajemen BOS provinsi sudah melaksanakan pengawasan di Kabupaten Sintang, untuk SMP Negeri 1 Ambalau pengawasan telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang,

dan untuk SMP Negeri 1 Kayan Hulu instansi yang telah melaksanakan pengawasan adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan inspektorat Kabupaten Sintang. Selanjutnya dijelaskan bahwa dengan adanya pengawasan akan mampu menghindari berbagai penyalahgunaan, ataupun pemborosan dan berbagai penyimpangan, hal yang sama dinyatakan oleh kepala SMP Negeri 1 Ambalau. Berkenaan dengan manfaat pengawasan tersebut bagi sekolah, Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu menyatakan :

“Terhadap pengawasan yang bersifat pembinaan sangatlah membantu pihak sekolah untuk menghindari segala penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena banyak hal yang belum dipahami. Setelah mendapatkan penjelasan yang gamblang kami dapat merealisasikan penggunaan dana BOS yang berpedoman pada RAKS sampai pelaporan tidak akan terjadi selisih maupun kesalahan.” (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.26 Wib).

Terkait penyalahgunaan dana BOS, penulis menanyakan apakah pernah terjadi penyalahgunaan dana BOS, dan kalau pernah bagaimana sanksi-sanksinya, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyatakan : “pernah, biasanya dengan mengembalikan dana ke Kas Negara, atau sanksi administrasi lainnya, seperti pihak Dinas harus memperingatkan kepala sekolah /pengelola dana BOS dengan surat tertulis.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.23 Wib).

1. Tujuan Pengawasan

Salah satu tujuan dari pengawasan adalah pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara lebih efisien dan efektif, menurut sekolah penerima mereka sangat terbantu dengan adanya pengawasan, hal ini dipaparkan oleh kepala sekolah SMP Negeri 1 Ambalau bahwa sekolah merasa sangat terbantu dengan adanya pengawasan, karena pihak pengawas juga melakukan pembinaan yang dapat memberikan masukan serta saran yang sangat mereka perlukan, sehingga mempermudah pihak sekolah untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu, yang menyatakan bahwa pihak sekolah merasa sangat terbantu apabila dilakukan pengawasan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, hal ini sejalan dengan tujuan dari pengawasan intern yang diharapkan mampu memberikan berbagai masukan dan solusi bagi pemecahan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS di sekolah penerima.

Pengawasan juga diharapkan mampu menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas, sehubungan dengan hal tersebut salah satu pejabat pengelola BOS menyatakan :

“Kadang-kadang bisa, tapi terkadang juga tidak, tergantung berbagai faktor seperti pihak yang mengawasi ataupun yang diawasi apakah masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti dari pihak pengawas apakah betul-betul mempunyai kemampuan dalam bidangnya (faktor SDM) dan apakah pihak yang diawasi mempunyai kemauan yang baik untuk menjalankan program tersebut dengan benar.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2011 Pukul.09.30).

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas yang ingin di capai, dapat terlaksana apabila faktor manusia yaitu pihak pengawas dan yang diawasi mempunyai itikad yang baik dan didukung pula oleh kemampuan SDM yang memadai. Pengawasan juga diharapkan mampu menciptakan suasana saling percaya di dalam maupun di luar organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut pihak sekolah menyatakan: “Ia, mampu memberikan rasa saling percaya, menghindari praduga dan berbagai anggapan yang kadang-kadang sangat mengganggu, baik yang datang dari dalam organisasi kami sendiri maupun dari masyarakat luas.” (wawancara tanggal 27 Oktober 2011, Pukul. 9.47 Wib)

Tanggapan serupa dinyatakan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kayan Hulu yang menyatakan bahwa selama ini pihak sekolah dan berbagai pihak terkait, berkomitmen untuk saling percaya, artinya pengawasan memang sangat dibutuhkan oleh setiap sekolah, karena mampu menciptakan dan menunjang rasa percaya bagi semua pihak baik untuk pihak sekolah maupun masyarakat. Di sisi lain pihak sekolah juga akan berusaha untuk melaksanakan semua kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan komitmen awal. Menanggapi hal tersebut pihak Dinas Pendidikan menyatakan:

“biasanya dapat menciptakan saling percaya, karena kalau dilakukan pengawasan pihak sekolah/pengelola BOS merasa lebih percaya diri bahwa apa yang dilakukan benar. Demikian pula dengan pihak pengawas, dapat melihat langsung apa yang telah dilakukan/dilaksanakan oleh sekolah. Tidak sekedar mendengar isu, laporan-laporan saja.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2011 Pukul 09.34 wib)

Manfaat pengawasan Dana BOS ke sekolah penerima memang perlu dilakukan hal tersebut dinyatakan pula oleh Ketua Komite pada SMP Negeri 1 Kayan Hulu dan SMP Negeri 1 Ambalau, manfaat pengawasan bagi sekolah adalah agar terhindar dari berbagai masalah dan dapat membantu sekolah yang bersangkutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana, Guru-guru dari masing-masing sekolah tersebut juga menyatakan bahwa pengawasan sangat bermanfaat dalam pengelolaan Dana BOS yang baik. Manfaat lain dari dilakukan pengawasan adalah dapat memperlancar operasionalisasi dana BOS, karena berbagai kesalahan dapat ditanggulangi secepat mungkin, sehingga syarat-syarat dan ketentuan yang ada dapat dipenuhi, dengan demikian memperlancar penyerapan dan penyaluran dana BOS ke masing-masing sekolah. Menanggapi hal tersebut kepala SMP 1 Ambalau menyatakan : “ia, dengan pengawasan kami dapat mengetahui berbagai kekurangan-kekurangan kami baik dari segi administrasi ataupun program kegiatan yang kami lakukan, kami akan melakukan perbaikan secepatnya dan dana BOS dapat diserap sesuai dengan jadwalnya”. (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 Pukul 09.51 Wib)

Kepala SMPN 1 kayan Hulu menyatakan bahwa dengan dilakukan pengawasan sangat membantu operasionalisasi dana BOS disekolahnya, karena dengan adanya pengawasan tersebut pihak sekolah akan lebih memahami cara pengelolaan yang baik dan benar. Dengan adanya pengawasan pihak sekolah mempunyai panduan dan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya dimasa yang akan datang.

2. Faktor Pendukung Pengawasan

Pengawasan yang baik didukung oleh berbagai faktor pendukung, sehingga mampu mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, prinsip yang dianut oleh seseorang sangat mendukung pengawasan hal ini dinyatakan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyatakan : “Kepala sekolah/pengelola yang baik atau yang memiliki prinsip teguh cenderung melaksanakan kegiatan/program sesuai rencana”.(Wawancara tanggal 24 Oktober 2011 Pukul 09.45 WIB). Agama serta kepercayaan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam rangka mendukung pengawasan yang baik dan optimal. Hal ini dipaparkan oleh pihak Dinas Pendidikan sebagai berikut : “peranan agama sangat penting, seperti ajaran agama yang menekankan kejujuran, keterbukaan, kerjasama tentu membantu dan mendukung dalam proses pengawasan.” (Wawancara tanggal 24 Oktober 2011 Pukul 09.48 Wib).

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan prinsip, agama dan kepercayaan sangat menentukan dalam pengelolaan dana BOS yang baik, hal tersebut didukung oleh sikap dan etos kerja yang baik, prinsip yang teguh dan komitmen yang tinggi dalam mengemban tugas sebagai pengelola dan pengawas dana BOS, sehingga mampu mendukung pengawasan yang efektif dan akhirnya mampu menciptakan akuntabilitas publik. Hal lain yang turut mendukung kelancaran pengawasan adalah kebijakan yang dijalankan oleh organisasi, dalam hal ini pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat

sangat membantu kelancaran pengawasan, hal ini dinyatakan oleh staf yang menangani dana BOS SMP sebagai berikut :

“sangat membantu, contohnya kebijakan Kepala Dinas yang memberikan tugas tambahan kepada para pengawas sekolah untuk turut memantau/memonitoring kegiatan di sekolah apakah sesuai dengan laporan-laporan yang ada. Disisi lain mampu menghemat biaya Perjalanan Dinas”. (Wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.51 Wib).

Kebijakan yang diambil oleh pejabat pembuat kebijakan harus selalu memperhatikan kelancaran program-program yang ada, kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terkait pengawasan dan untuk menanggulangi berbagai hambatan seperti yang dipaparkan di atas adalah dengan memberikan tugas tambahan kepada pengawas sekolah untuk turut mengawasi dan memberikan pengarahan dan masukan bagi pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS. Manfaat lain dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk menghemat biaya/pengeluaran yang digunakan untuk pengawasan di setiap sekolah. Peranan biaya atau anggaran dalam pengawasan juga diharapkan dapat memenuhi standar yang diinginkan, hal ini berkenaan dengan jumlah sekolah yang harus diawasi dan jarak setiap sekolah yang bervariasi, untuk daerah-daerah yang jauh dan transportasi mahal tentu membutuhkan dana yang besar hal ini dinyatakan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagai berikut: “ Pengawasan yang baik tentu didukung oleh anggaran yang sesuai, pengawasan bagi sekolah-sekolah yang letaknya jauh memerlukan biaya yang cukup besar, anggaran

pembiayaan yang mendukung tentu sangat diharapkan“ (Wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.55 WIB).

Berdasarkan pernyataan tersebut pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sangat mengharapkan anggaran yang sesuai untuk dapat melaksanakan pengawasan yang optimal, hal ini disebabkan oleh sebaran sekolah-sekolah yang cukup luas dan jarak yang cukup jauh dari ibu kota Kabupaten, dengan jumlah SD dan SMP yang mencapai lebih dari 400 buah dengan jumlah dana monitoring kurang dari 100 juta, hanya berkisar 80 jutaan, tentu akan menghambat dilakukannya pengawasan yang optimal. Hal lain yang tak kalah penting dalam menunjang pengawasan yang efektif adalah bagaimana sebuah organisasi mengorganisir dengan sebaik mungkin segenap sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, prosedur kerja yang jelas dan penempatan pegawai yang sesuai mutlak diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik, pentingnya penempatan pegawai dan prosedur yang jelas dipaparkan sebagai berikut :

“Tentu, prosedur kerja yang ada diharapkan mampu mendukung pengawasan efektif, artinya prosedur yang ada akan mempermudah dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana BOS... contohnya untuk memudahkan kontrol terhadap data dan pengurusan dana BOS, bendahara untuk masing-masing jenjang, (SD dan SMP), adalah staf dari masing-masing bidang, sehingga jika terjadi selisih data akan mudah terdeteksi secara cepat, dan pihak sekolah akan mudah berkoordinasi/konsultasi di masing-masing bidang.”

(Wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.05 Wib)

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang telah berusaha menselaraskan berbagai

unsur yang ada guna menunjang pengawasan yang efektif. Dengan menggunakan prosedur yang telah ada dan penempatan pegawai yang sesuai tentu mempermudah proses pengawasan, dan mampu menciptakan efektivitas yang tinggi. Unsur-unsur yang ada di dalam organisasi perlu dikoordinasikan dengan baik, persamaan persepsi tentang tujuan suatu organisasi atau sebuah program dapat diciptakan melalui koordinasi yang kontinyu, kaitanya dengan pengawasan BOS, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyatakan :

“Peranan koordinasi sangat penting, biasanya pihak pengawas (Tim manajemen BOS pusat/Provinsi, BPK, BPKP atau Inspektorat) sebelum turun ke sekolah-sekolah akan menghubungi pihak Dinas Pendidikan, biasanya untuk meminta informasi terkait sekolah-sekolah yang akan dituju, seperti untuk mengetahui lokasinya, jumlah dana, dan berbagai informasi yang dibutuhkan guna memperlancar proses pengawasan.... Apabila sudah selesai pengawasan biasanya pihak pengawas akan berkoordinasi kembali, seperti cara-cara pembinaan ke sekolah, atau bagaimana cara melakukan pengawasan yang akan datang”.
(Wawancara tanggal 24 Oktober 2011 Pukul 10.11 Wib).

Peranan koordinasi ini bagi sekolah juga sangat penting, seperti dinyatakan oleh Kepala SMP Negeri 1 Ambalau berikut : “Peranan koordinasi, tentu dapat membantu mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dilapangan/sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik”. (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 Pukul 10.05 Wib). Sementara itu hal yang sama dinyatakan oleh Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu yang menyatakan bahwa koordinasi memegang peranan yang sangat penting karena mampu meluruskan jika terdapat kekeliruan. Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan koordinasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang maupun bagi Sekolah penerima Dana BOS sangat penting

karena mampu memperlancar proses pengawasan dan di sisi lain dapat menghindarkan dari berbagai penyimpangan dan kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.

Kelancaran pengawasan juga ditentukan oleh perencanaan dan program yang telah ditetapkan sebelumnya, diimplementasikan menjadi berbagai kegiatan yang tahapannya telah disusun sedemikian rupa sehingga mempermudah pengawasan. Pengawasan terhadap tahapan-tahapan dan capaian yang ada selalu berpatokan pada program awal, hal ini dinyatakan oleh Kepala SMP 1 Ambalau yang menyatakan bahwa program yang telah ditetapkan akan sangat membantu proses pengawasan. Secara lebih rinci Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu menyatakan :

“Pengawasan ini biasanya akan berjalan lancar dan baik bila kami juga telah melakukan perencanaan awal yang baik, artinya pengawasannya akan mengacu pada rancangan awal kami, kami akan melakukan kegiatan sesuai rencana awal (RKS), apabila tidak sesuai dengan rencana tersebut tentu akan menjadi pertanyaan dan kami harus siap untuk memberikan jawaban yang benar.” (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 Pukul 09.56 Wib).

3. Asas-asas Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan dengan memperhatikan panduan dan pedoman umum yang harus ditaati, hal ini akan membantu pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut asas-asas yang harus ditaati dapat diuraikan sebagai berikut, setiap pengawasan harus memberikan kontribusi yang baik untuk mencapai tujuan

program BOS, hal ini dinyatakan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yang menyatakan bahwa pengawasan sangat berpengaruh dan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian pula dengan kontribusi pengawasan dalam menciptakan efisiensi dalam pengelolaan dana BOS, dalam hal ini mampu menghindari pemborosan/penyalahgunaan dalam pengelolaan dana BOS. Pengawasan juga mampu meningkatkan rasa tanggungjawan pada manajer dalam hal ini Kepala Sekolah, hal ini dinyatakan oleh pengelola BOS di Dinas Pendidikan sebagai berikut:

“Dengan adanya pengawasan, para pengelola dana BOS akan semakin merasa perlu untuk mengelola dana BOS dengan baik, otomatis tanggungjawab mereka akan meningkat terutama agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut dan selalu berpedoman pada ketentuan.” (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.20 Wib).

Pengawasan yang dilakukan dengan baik dilakukan dengan tahapan-tahapan yang benar, berbagai kendala di lapangan selalu didokumentasikan dengan baik, sehingga menjadi panduan dan referensi bagi pelaksanaan pengawasan di masa yang akan datang. Berbagai tindakan dan solusi di masa yang lalu akan di nilai dan dianalisa dengan sebaik-baiknya, sehingga pengawasan itu sendiri mampu mengatasi/memberikan solusi bagi program BOS dimasa yang akan datang, hal ini dinyatakan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

“Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BOS yang terjadi sebelumnya akan selalu menjadi pertimbangan/acuan dalam menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, atau dimasa yang akan datang, untung rugi dari sebuah kebijakan

yang diambil dimasa lampau akan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan/pemecahan masalah di masa kini maupun yang akan datang.” (Wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.05 Wib)

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa pihak Dinas Pendidikan akan menganalisa berbagai tindakan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang sesuai guna penyempurnaan berbagai kebijakan di masa yang akan datang. Peranan koordinasi di berbagai lini turut mendukung kelancaran pengawasan, jalur koordinasi baik vertikal maupun horizontal turut menentukan keberhasilan sebuah pengawasan. Partisipasi dari manajer bawahan sangat diharapkan, sehubungan dengan hal tersebut ketika penulis menanyakan apakah pengawasan mampu meningkatkan partisipasi dari manajer bawahan, jawaban dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang adalah :

“Setiap penggunaan dana akan selalu dimintai pertanggungjawabannya, biasanya penggunaan dana yang sudah diatur sedemikian rupa misalnya untuk setiap unit/sub kegiatan pasti terdapat orang/pengelola yang bertanggungjawab atas setiap kegiatan tersebut, dengan demikian orang/unit tersebut yang akan dapat menjelaskan dengan sedetail mungkin setiap tindakan yang diambil atau dana yang digunakannya, artinya mereka akan berpartisipasi dalam memberikan informasi apabila pengawasan dilakukan.” (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.05 Wib)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi dari manejer bawahan dapat tercipta dengan dilaksanakannya pengawasan, dimana setiap jejang dalam organisasi dalam hal ini sekolah penerima Dana BOS turut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Salah satu asas yang harus diperhatikan dalam

melaksanakan pengawasan adalah dalam melaksanakan pengawasan selalu berpedoman pada rencana awal, sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan memberikan pernyataan bahwa dalam melaksanakan pengawasan selalu berpedoman pada Buku Panduan BOS, RKA, selanjutnya akan dibandingkan dengan SPJ atau laporan keuangan yang ada. Ketika ditanyakan apakah dalam melakukan pengawasan selalu disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada, jawaban dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang adalah : “selalu disesuaikan dengan struktur organisasi, pemeriksaan biasanya dilakukan bertahap atau selalu berpedoman pada struktur organisasi dengan mempertimbangkan garis koordinasi, garis komando dan sebagainya”. (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.21 Wib)

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap dana BOS selama ini selalu memperhatikan struktur organisasi yang ada, hal tersebut penting mengingat jalur atau arus kerja tercermin dalam garis-garis komando, garis koordinasi dan sebagainya. Pengawasan juga dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari Manajer yang bersangkutan, dalam hal ini informasi apa yang ingin diketahui oleh seorang manajer menyangkut pelaksanaan Dana BOS di masing-masing sekolah, menanggapi hal tersebut pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyatakan : “kebutuhan akan informasi yang akurat tentang berbagai hal yang dibutuhkan, dalam menanggapi isu/laporan-laporan merupakan contoh nyata kalau pengawasan dapat dilakukan apabila manajer membutuhkan

informasi yang sifatnya mendesak”. (wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.25 Wib).

Menanggapi hal tersebut Kepala SMP Negeri 1 Ambalau menyatakan : “pengawas biasanya melakukan pengawasan sesuai dengan kebutuhan mereka, ada yang terfokus pada kurikulum, ada yang menitikberatkan pada pemanfaatan dana atau hanya pada pengadministrasiannya”. (wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.07 Wib). Berkenaan dengan hal tersebut Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu menyatakan hal yang serupa, berikut petikan hasil wawancaranya : “Pengawasan yang dilakukan selama ini kami rasakan sangat bermanfaat, artinya sesuai dengan keinginan kami selaku manajer di sekolah”. (wawancara tanggal 27 Oktober pukul 13.50 Wib)

Berdasarkan berbagai informasi yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa manajer baik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang maupun instansi terkait, bahkan pada level sekolah selalu melakukan pengawasan sesuai dengan kebutuhan manajer masing-masing, manfaat apa yang ingin mereka dapatkan dari sebuah pengawasan, aspek-aspek yang berkaitan dengan hal tersebutlah yang akan diawasi. Asas yang harus diperhatikan dalam melakukan pengawasan diantaranya adalah standar pengawasan, artinya dalam melaksanakan pengawasan selalu memiliki standar-standar tertentu sebagai acuan atau pedoman. Standar yang digunakan dalam melakukan pengawasan dana BOS adalah Buku Petunjuk pengelolaan Dana BOS yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, dan untuk standar harga barang mengacu pada standar harga yang dikeluarkan oleh Bupati Sintang. Aspek lain yang

harus diawasi adalah strategi yang digunakan atau yang dijalankan terkait dengan pengelolaan dana BOS, berkenaan dengan hal tersebut pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyatakan : “Rencana Kerja Sekolah merupakan strategi yang disusun oleh pihak sekolah dalam pemanfaatan dana BOS agar dapat mencapai tujuannya, pengawasan biasanya berpatokan pada rencana awal, dapat terlihat konsisten tidaknya strategi yang diambil oleh pengelola/kepala sekolah”. (Wawancara tanggal 25 Oktober 2011 Pukul 11.34 Wib)

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengawasi dana BOS peranan Rencana Kerja Sekolah yang disusun oleh Kepala Sekolah dan Dewan Guru serta disahkan oleh pengawas memegang peranan yang sangat penting, karena pada rencana dan berbagai tujuan tersebutlah akan tergambar berbagai pembiayaan yang akan diperlukan guna pencapaian tujuan sekolah. Apabila pembiayaan tidak sesuai dengan rencana yang ada, maka perlu dipertanyakan apakah ada kaitannya antara pengeluaran dengan rencana dan tujuan sekolah tersebut. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang juga menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan juga memperhatikan asas pengecualian dalam hal ini dalam pengawasan harus memperhatikan berbagai faktor, seperti iklim, keadaan atau kondisi obyek yang akan diawasi, hal ini dilakukan agar pengawasan yang dilakukan benar-benar optimal, perlu adanya persiapan-persiapan khusus sebelum melakukan pengawasan, seperti informasi tentang letak obyek yang akan diawasi serta data pendukung lainnya.

Pengawasan juga harus fleksibel artinya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, hal ini erat kaitannya dengan asas pengecualian di atas, sifat fleksibel yang ada tentu dengan memperhatikan rambu-rambu serta aturan yang ada. Sistem pengawasan yang dilakukan biasanya ditinjau kembali, terutama kalau dirasa kurang efektif dan efisien, hal ini mutlak dilakukan guna mendapatkan sistem pengawasan yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan, karena tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk mengurangi berbagai pemborosan dan kerugian negara, artinya pengawasan itu juga harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya dan tidak mengeluarkan dana yang berlebihan. Ketika ditanyakan apa tindakan yang biasanya diambil apabila terjadi penyimpangan/kesalahan administrasi yang ada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyatakan akan melakukan pengembalian terhadap SPJ disertai catatan-catatan atau pemberitahuan lisan agar SPJ tersebut segera diperbaiki atau dilengkapi, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang, disamping bermanfaat bagi pihak yang diawasi di sisi lain dengan mengadministrasikan SPJ dengan benar dapat mendukung tersalurnya dana BOS dan program BOS akan semakin baik dalam pelaksanaannya, pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pendidikan di Kabupaten Sintang pada khususnya.

4. Sifat dan waktu pengawasan

Pengawasan dana BOS meliputi pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Pengawasan melekat dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya, prioritas utama pengawasan dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah (Kemendiknas, 2011:35). Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah penerima dana BOS menjadi prioritas karena pihak sekolah adalah pengelola dan pengguna dana tersebut, sehingga pengawasan diarahkan pada pemanfaatan dana yang ada, dan hasil yang diperoleh atau dicapai dengan adanya dana tersebut. selanjutnya sifat dan waktu pengawasan dana BOS dapat digambarkan sebagai berikut, pengawasan sebelum dana BOS disalurkan biasanya hanya terbatas pada data-data yang dihimpun dari sekolah dan dibandingkan dengan data yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, sehubungan dengan hal tersebut pihak Dinas Pendidikan menyatakan :

“Pengawasan biasanya hanya memvalidasi data penerima BOS se Kabupaten, yang mencakup data sekolah dan jumlah siswa penerima dana BOS, data ini berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pihak sekolah sebelumnya, dicocokkan dengan data siswa yang riil pada saat dana akan disalurkan.”(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.08 Wib.)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Ambalau yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan terhadap data awal seperti jumlah siswa dan format-format yang digunakan/pendukung. Sementara itu

Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu menyatakan bahwa pengawasan sebelum program BOS dilaksanakan juga terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah di mana peranan dan partisipasi dari *stakeholders* pendidikan juga dilihat, seperti peranan dari Komite Sekolah dan Dewan Guru dalam menentukan perencanaan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah penerima dana BOS, peranan berbagai pihak tersebut akan terlihat dalam pengelolaan yang mengikutsertakan berbagai unsur di masyarakat maupun pada intern sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya Kepala SMP 1 Kayan Hulu menyatakan bahwa bentuk partisipasi tersebut akan terlihat dalam administrasi pengelolaan dana BOS, dimana setiap melakukan pengeluaran dan penarikan dana BOS pada format-format yang ada selalu diketahui/ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah, dengan keikutsertaan berbagai unsur masyarakat tersebut diharapkan masyarakat dapat mengawasi penggunaan dan pemanfaatan dana BOS tersebut, sehingga masukan dan saran dalam penggunaan dan pengelolaan dana adalah bentuk partisipasi dari masyarakat.

Keikutsertaan dari berbagai pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS dinyatakan oleh Guru SMP Negeri 1 Kayan Hulu sebagai berikut : “ Kepala Sekolah selalu berkoordinasi dalam kegiatan atau pengelolaan Dana BOS, juga penggunaan dana untuk kegiatan ekstrakurikuler “. (Wawancara tanggal 1 Nopember 2011, Pukul 9.25). Pada SMP Negeri 1 Ambalau keikutsertaan guru dalam penggunaan dan pemanfaatan Dana BOS digunakan dalam kegiatan Ekstrakurikuler yang diasuh oleh guru yang mengampu mata

pelajaran yang bersangkutan, selanjutnya dijelaskan bahwa guru juga dilibatkan dalam menangani perbaikan/rehab ringan pada sarana pendidikan di sekolah.

Komite sekolah dilibatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana BOS berupa keikutsertaannya dalam merencanakan pemanfaatan Dana BOS tersebut, hal ini dinyatakan oleh Komite SMP Negeri 1 Kayan Hulu. Pada SMP Negeri 1 Ambalau meyakini bahwa pihak Komite hanya dilibatkan dalam perencanaan awal penggunaan Dana BOS saja, tapi untuk pengelolaan selanjutnya tidak pernah dilibatkan lagi. Hal tersebut dinyatakan oleh Komite SMP Negeri 1 Ambalau sebagai berikut : “ Saya/kami. Komite sekolah hanya dilibatkan pada awal rapat saja, untuk perencanaan penggunaan BOS saja, selanjutnya tidak pernah lagi” (Wawancara tanggal 30 Oktober 2011, pukul 8.34 WIB). Setelah dana BOS disalurkan pengawasan dilakukan secara lebih intensif, pengawasan ini meliputi pengawasan administrasi dan pengawasan langsung ke lapangan, menjawab pertanyaan penulis tentang bagaimana pengawasan sesudah dijalankannya program BOS, pihak Dinas Pendidikan menyatakan : “pengawasan dilakukan secara langsung ke sekolah atau melalui SPJ, ada juga yang melalui angket, lembar money, dan daftar isian lainnya, tergantung kebutuhan”. (Wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.10 Wib).

Hal serupa dinyatakan oleh Kepala SMP Negeri 1 Ambalau dan serawai yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap dana BOS setelah dana tersebut dicairkan adalah dengan meneliti kelengkapan SPJ dan melakukan pengawasan

ke sekolah untuk melihat hasil dari pembiayaan BOS. Sementara itu Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan setelah disalurkannya dana BOS lebih kompleks, pengawasan dilakukan untuk melihat peningkatan mutu pembelajaran di sekolah sesuai dengan rencana anggaran sekolah, sarana prasarana yang mendukung peningkatan mutu tersebut dan pengadaan buku yang dibiayai dari dana tersebut. Berkenaan dengan waktu dilaksanakannya pengawasan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyatakan :

“Selama proses penyaluran tetap dilakukan pengawasan baik secara langsung atau melalui SPJ setiap triwulan, ada juga yang sudah dijadwalkan, tetapi dapat pula dilakukan tiba-tiba/mendadak contohnya apabila terdapat laporan dari masyarakat yang dianggap perlu diselesaikan/diatasi.” (Wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.15 Wib)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan secara teratur melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh pihak sekolah. Pengawasan juga dilaksanakan dengan turun langsung ke sekolah-sekolah penerima dana BOS, walaupun belum bisa ke semua sekolah penerima tetapi akan dilakukan pengawasan ke Kecamatan-Kecamatan yang terdapat sekolah-sekolah yang dirasa perlu untuk dilakukan pengawasan. Untuk kasus-kasus tertentu akan dilakukan pengawasan yang fleksibel, artinya dapat dilakukan pengawasan mendadak, apabila terdapat pengaduan ataupun permasalahan terkait penggunaan dana BOS di sekolah penerima.

5. Monitoring

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, khusus untuk kegiatan monitoring didapatkan data-data sebagai berikut, Monitoring dana BOS dan pelaporannya selalu berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kegiatan Monitoring BOS perlu dilakukan agar program ini berjalan lancar dan transparan, sehingga mampu pihak sekolah mampu mengelola dana BOS dengan lebih efektif dan efisien. Monitoring pada program BOS dibedakan atas monitoring internal dan monitoring eksternal, monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen baik itu Manajemen BOS Tingkat Pusat, Manajemen BOS Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten. Monitoring internal bersifat supervise klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS.

Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan, dan rekomendasi guna perbaikan program. Dalam kegiatan monitoring ini lebih diarahkan pada pemantauan, pembinaan, dan penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah penerima. Tujuan khusus dari dilaksanakan monitoring adalah untuk memastikan bahwa dana BOS telah diterima oleh yang berhak, baik menyangkut jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat. Komponen-komponen utama yang wajib dimonitor antara lain mencakup: Alokasi dana

sekolah penerima bantuan, Penyaluran dan penggunaan dana, Pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, dan Pelaporan.

Monitoring dari instansi terkait terhadap program BOS diharapkan mampu memberikan masukan dan perbaikan bagi terlaksananya program BOS yang semakin baik di masa yang akan datang, sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dana BOS di Kabupaten Sintang, pihak Dinas Pendidikan menyatakan bahwa Tim Manajemen BOS Provinsi memonitor pelaksanaan dan penyaluran dana BOS melalui laporan dari pihak Tim Manajemen BOS Kabupaten, selanjutnya dilakukan monitoring ke Kabupaten dan kemudian langsung ke sekolah penerima. Terkait monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten, monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana di sekolah, penggunaan dana di tingkat sekolah, responden terdiri dari sekolah dan murid atau orangtua murid, monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana, bila biaya monitoring terbatas disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain, monitoring juga dapat melibatkan pengawas sekolah.

Tim Manajemen Kabupaten memonitoring penyaluran dan pelaksanaan BOS melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh sekolah penerima, demikian petikan hasil wawancara kepada staf pengelola BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang : “Monitoring dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban keuangan/SPJ dan dilanjutkan dengan monitoring ke sekolah penerima agar dapat melihat secara langsung bukti fisik dari penggunaan dana atau kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana tersebut”.

(Wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.25 Wib). Sedangkan untuk memonitor alokasi dana pada sekolah penerima dapat terlihat dari Rencana Kerja Sekolah atau Format Lembar Kerja, untuk memonitor penggunaan dana dan penyalurannya dapat terlihat dari laporan keuangan setiap triwulan, kemudian buku rekap yang dibuat khusus oleh bendahara pembantu di Dinas Pendidikan, penyaluran dana dan penyerapan dana akan tergambar di buku rekap tersebut, sehingga pihak Dinas Pendidikan dapat segera mengetahui sekolah-sekolah mana yang belum menerima dana BOS, atau sekolah mana yang belum menyerahkan SPJ, selanjutnya pihak Dinas akan segera menghubungi sekolah-sekolah tersebut agar segera mengambil dana yang ada atau segera melaporkan penggunaan dana BOS tersebut.

Penanganan terhadap berbagai pengaduan juga harus ditangani dengan baik, untuk itu dibentuk Tim Pengawas yang akan melihat langsung dan melakukan pengawasan guna mencari bukti dan informasi terkait pengaduan tersebut, selanjutnya apabila terbukti ada penyalahgunaan akan diambil langkah penanganan segera mungkin, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyatakan bahwa akan selalu menerima berbagai pengaduan yang disertai bukti-bukti yang ada, hal ini sangat penting agar informasi yang ada terkait pengaduan haruslah valid, artinya pihak yang pengadu harus melaporkan penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan memperhatikan prosedur dan etika yang berlaku/praduga tak bersalah. Tim Manajemen BOS dapat memonitor administrasi keuangan BOS atau laporan penggunaan dana BOS melalui buku rekap penyampaian SPJ BOS yang terdapat di Dinas

Pendidikan Kabupaten Sintang, berikut pernyataan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang : “melalui rekap penyampaian SPJ, akan terlihat sekolah mana yang sudah menyelesaikan dan belum, yang sudah diterima biasanya sudah sesuai ketentuan, atau kalau ada yang perlu dilengkapi tidak terlalu mendesak”. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.23 Wib).

Menjawab pertanyaan penulis apakah semua laporan sudah sesuai dengan format atau aturan yang berlaku pihak Dinas Pendidikan Kabupaten menjawab belum semua sekolah mampu memberikan SPJ yang sesuai ketentuan, masih terdapat berbagai kekeliruan yang harus segera diperbaiki, sehingga kadang-kadang memperlambat proses penyaluran untuk triwulan berikutnya, jika diprosentasekan ada sekitar 10 % sekolah yang masih salah dalam mengadministrasikan laporan penggunaan dana BOS. Pengadministrasian dana BOS sesuai dengan format mutlak harus ditaati oleh setiap sekolah penerima, hal ini untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, jika terjadi kesalahan dalam mengadministrasikan dan pelaporan dana BOS pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang akan melakukan teguran baik secara lisan ataupun tertulis berupa catatan-catatan sebagai bahan koreksi dan perbaikan agar laporan tersebut sesuai dengan ketentuan.

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang memaparkan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengadministrasian dan pengelolaan dana BOS yang baik adalah faktor SDM yang masih kurang memadai baik dari

segi kualitas maupun kuantitas, faktor lainnya adalah letak geografis. Faktor kualitas ini berhubungan erat dengan kemampuan dan kecakapan seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dana BOS, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki cenderung mempengaruhi cara kerja dan teknik-teknik pengadministrasian yang ada. Faktor jumlah personil yang ada juga sangat mempengaruhi, hal ini akan mengakibatkan beban kerja yang tidak seimbang bagi pengelola BOS, karena disamping sebagai pengelola/bendahara BOS juga merangkap sebagai tenaga pengajar yang memiliki jam mengajar yang cukup tinggi.

Berdasarkan buku panduan teknis pengelolaan BOS, Tim Manajemen BOS Kabupaten dalam melakukan monitoring harus memperhatikan beberapa aspek yang sangat penting yaitu dalam memonitoring pelaksanaan program, monitoring harus ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana di sekolah serta penggunaan dana. Dalam mencari data dan informasi para responden terdiri Kepala Sekolah dan murid/atau orang tua murid. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana, bila terjadi permasalahan dengan biaya monitoring dapat dilakukan monitoring secara terpadu dengan program lain, pengawas sekolah juga dapat dilibatkan dalam kegiatan monitoring.

Monitoring dana BOS juga termasuk memonitor penanganan pengaduan, monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah di sekolah, selanjutnya didokumentasikan dengan sebaik-baiknya. Kerjasama dapat dilakukan dengan lembaga atau instansi

terkait guna menangani berbagai pengaduan, selanjutnya para responden dapat disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Guna memonitor penyerapan dan penyaluran dana BOS di sekolah biasanya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang akan melakukan pemberitahuan baik secara lisan maupun melalui media telepon, berikut jawaban dari pihak Dinas Pendidikan ketika penulis menanyakan bagaimana cara memonitor penyaluran dan penyerapan dana BOS di sekolah : “Untuk memonitor penyaluran dan penyerapan dana di sekolah kami gunakan buku pembantu, apabila belum tersalurkan kami akan mengingatkan secara lisan atau menggunakan SMS”. (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.40 Wib).

Penggunaan dana BOS akan dimonitor oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang melalui SPJ yang disampaikan oleh sekolah, dan apabila melakukan monitoring ke sekolah para responden biasanya terdiri atas Kepala Sekolah, Dewan Guru, murid atau orang tua murid. Menjawab pertanyaan penulis apakah pihak Komite Sekolah dan Guru pernah menjadi responden apabila dilakukan monitoring dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, pihak Komite Sekolah SMP Negeri 1 Kayan Hulu dan Komite Sekolah SMP Negeri 1 Ambalau menyatakan tidak pernah dan belum pernah menjadi responden dalam kegiatan monitoring Dana BOS tersebut. Sementara untuk Guru dari masing-masing sekolah tersebut menyatakan pernah menjadi responden dalam kegiatan monitoring dana BOS oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang pada sekolah masing-masing.

Monitoring biasanya dilakukan setelah dana BOS disalurkan. Biaya monitoring yang tersedia cukup memadai, dan apabila masih dapat kekurangan-kekurangan pihak Dinas Pendidikan mengambil kebijakan seperti pemberian tugas tambahan kepada para pengawas sekolah, agar dapat melakukan kegiatan monitoring di sekolah. Peranan dari pengawas sekolah cukup efektif dalam membantu kelancaran monitoring dana BOS, karena selain memonitor BOS, pengawas juga dapat melaksanakan pengawasan sekolah secara menyeluruh. Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang juga sudah mengidentifikasi semua pengaduan terkait dana BOS, apalagi kalau ditemukan bukti-bukti pendukung pasti akan ditindaklanjuti.

Menjawab pertanyaan peneliti apakah ada permasalahan terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS di masing-masing sekolah, pihak Komite SMP Negeri 1 Ambalau dan Komite SMP Negeri Kayan Hulu menyatakan bahwa di masing-masing sekolah belum ditemukan permasalahan-permasalahan yang berarti, dan semua masalah masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik, karena selalu berpedoman pada buku petunjuk yang ada. Hal serupa juga dinyatakan oleh masing-masing guru dari sekolah tersebut. Berbagai permasalahan yang timbul sudah didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang ada, berikut pernyataan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang : “Selama ini biasa diselesaikan, biasanya kami akan membuat berita acara pemeriksaan berikut mendokumentasikan berbagai dokumen-dokumen terkait seperti bukti pengaduan, surat-surat pernyataan dan sebagainya”. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.13 Wib).

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam menanggapi semua pengaduan, baik yang kategori biasa maupun berat melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi lain, yakni dengan pihak Inspektorat Kabupaten, BPK, dan BPKP. Kerjasama dengan instansi lain tersebut lebih kearah pembinaan. Permasalahan yang terjadi di sekolah biasanya akan ditangani sesuai dengan prosedur yang ada. Informasi yang dibutuhkan pun beragam guna mendukung pengawas dalam mengidentifikasi permasalahan dengan baik, para responden yang dimintai keteranganpun beragam, semuanya disesuaikan dengan kasus atau permasalahan yang ada.

6. Evaluasi

Mengevaluasi sebuah program yang sudah dilaksanakan merupakan sebuah usaha untuk mendapatkan solusi yang baik dalam penerapan program yang akan datang, kegiatan evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan masukan dan saran yang terbaik, dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan dalam sebuah program. Berknaan dengan hal tersebut pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menyatakan untuk mengevaluasi program BOS yang ada di Kabupaten Sintang. Tim Manajemen BOS Kabupaten Sintang akan melakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring yang ada, berbagai kejadian atau permasalahan yang terjadi dalam implementasi program BOS akan dibahas untuk menemukan solusi yang terbaik guna pelaksanaan program ini di masa yang akan datang. Sanksi terhadap penyalahgunaan dana BOS yang mengakibatkan kerugian Negara dan atau/siswa akan dijatuhi sanksi. Sanksi

kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam bentuk, diantaranya sanksi kepegawaian, penerapan tuntutan perbendaharaan dan anti rugi, penerapan proses hukum, dan pemblokiran dana dan pemberhentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada Kabupaten/Kota apabila terbukti terjadi pelanggaran yang disengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan (Kemendiknas, 2011:36).

Menanggapi pertanyaan penulis bagaimana menindaklanjuti jika ditemukan adanya penyimpangan dan permasalahan di dalam pelaksanaan program BOS di Kabupaten Sintang, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menjawab :

“Kalau ada penyimpangan di sekolah penerima untuk tahap awal biasanya hanya pembinaan saja, tetapi bila sudah dirasa perlu tindakan atau sanksi akan diberikan sanksi yang sesuai, diantaranya sanksi administrasi atau sanksi kepegawaian, dan jika terdapat permasalahan dalam program BOS di Kabupaten Sintang pihak Dinas akan berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS provinsi atau pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi yang terbaik”. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.10 Wib)

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua permasalahan yang mungkin terjadi dalam implementasi dana BOS sudah diprediksikan dari awal tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat kasus atau masalah yang memerlukan pertimbangan yang lebih matang dan analisa yang lebih menyeluruh, untuk itu dibutuhkan informasi dan saran yang lebih detail sehingga koordinasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan. Hal ini untuk menemukan solusi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. untuk

masalah-masalah yang tergolong ringan dan sedang dan dapat ditanggulangi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, berbagai sanksi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku baik sanksi administrasi maupun sanksi kepegawaian. Terkait pengelolaan Dana BOS oleh pihak sekolah dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, beberapa saran disampaikan oleh Komite Sekolah SMP Negeri 1 Kayan Hulu sebagai berikut : “ Dana BOS agar dikelola dengan baik dan terbuka, pihak sekolah agar selalu berkoordinasi dengan Komite Sekolah dalam pemanfaatan Dana BOS, Dana BOS agar lebih banyak digunakan untuk siswa, kalau bisa 60% dari jumlah total dana, dan agar pengawasan jangan hanya berdasarkan laporan semata, sebaiknya pihak Dinas Pendidikan harus sering mengecek ke lapangan/sekolah untuk melihat realisasi/penggunaan Dana BOS tersebut.” (Wawancara tanggal 3 Nopember 2011, pukul 14.55).

Komite SMP Negeri 1 Ambalau menyarankan agar pihak sekolah lebih melibatkan orang tua/Komite Sekolah dalam pengelolaan dana BOS, dan pihak terkait lebih mengintensifkan pengawasan. Guru SMP Negeri 1 Ambalau menyarankan agar dalam pengelolaan Dana BOS lebih terbuka, sosialisasi yang lebih mendalam menyangkut teknis pengelolaan Dana BOS. Sementara Guru SMP Negeri 1 Kayan Hulu menyarankan agar adanya peningkatan dana BOS, karena di SMP Negeri 1 Kayan Hulu lebih dari 50% Dana BOS digunakan untuk membayar Tenaga Guru dan Tenaga Administrasi Honorer, aturan-aturan yang ada agar lebih fleksibel, dan dialokasikan dana untuk perjalanan dinas dari sekolah-sekolah di pedalaman.

C. Administrasi penyaluran Dana BOS

Mulai tahun 2011 dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula dari skema APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011. Sebelum dana BOS disalurkan dilakukan terdapat persiapan-persiapan yang harus dilakukan, untuk sekolah Negeri dan Swasta terdapat sedikit perbedaan karena pada sekolah swasta terdapat perjanjian hibah antara Pemerintah Daerah dengan pihak Sekolah/Badan/Lembaga/Organisasi swasta yang bersangkutan. Khusus untuk sekolah Negeri Dana BOS dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk program/kegiatan, yang uraiannya dialokasikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal pada SKPD Pendidikan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran SKPD.

Administrasi penyaluran dana BOS kesekolah penerima untuk tahun 2011 dibagi dalam 2 (dua) tahapan yaitu tahap I Penyaluran Dana dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah, dan tahap II adalah Penyaluran Dana dari Kas Umum Daerah ke Sekolah Negeri. Penyaluran dana tahap I tidak terdapat masalah dan berjalan sesuai dengan waktu dan prosedur yang ada, tetapi untuk tahap kedua ada sekolah-sekolah yang tidak dapat menyerap dana sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan, berikut pernyataan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang :

“ada yang sesuai jadwal, ada pula yang tidak, yang tidak sesuai jadwal biasanya disebabkan karena SPJ terlambat, atau karena kesalahan administrasi yang pada akhirnya juga menyebabkan jadwal penyaluran untuk tiap triwulan jadi terlambat karena harus memperbaiki beberapa kesalahan/melengkapi administrasinya”. (Wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.21 Wib).

Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kelengkapan administrasi memegang peranan yang sangat penting, di mana administrasi yang baik dan sesuai dengan ketentuan akan turut memperlancar penyerapan dan penyaluran dana BOS untuk triwulan berikutnya. Disamping itu keterlambatan dalam menyampaikan SPJ dana BOS ini juga akan mengakibatkan terlambatnya penyaluran dana BOS di sekolah-sekolah penerima. Pengelolaan administrasi oleh pihak sekolah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan akhirnya mengambat penyaluran dana ke sekolah. Waktu penyaluran dana BOS tahun anggaran 2011, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan, untuk periode Januari sampai Desember 2011, yaitu semester 2 (dua) Tahun Pelajaran 2010/2011 dan semester 2 (dua) Tahun Pelajaran 2011/2012. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yakni periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.

Laporan pertanggungjawaban keuangan paling lambat di sampaikan kepada Tim Majaemen BOS Kabupaten/Kota setiap triwulan paling lambat 10 hari kerja sebelum berakhirnya triwulan tersebut. Laporan yang diharapkan adalah laporan yang sesuai dengan format dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan, petunjuk teknis laporan keuangan harus

menjadi acuan dalam pengelolaan dana BOS, dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan pihak sekolah memiliki pedoman dan pemahaman yang sama dalam membuat laporan keuangan. Petunjuk teknis keuangan ini bertujuan agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparansi, akuntabel, efisiensi dan efektifitas, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Pengelolaan secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah diharapkan mampu meningkatkan mutu pengelola dan mutu pendidikan. Manajemen keuangan menuntut para pengelola dana BOS agar mampu melakukan perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan secara baik dan transparan. Sehubungan dengan pelaporan yang sesuai ketentuan, staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yang menerima pelaporan/SPJ dari SMP di Kabupaten Sintang menyatakan:

“ Kalau dirata-ratakan 80 % saja laporan yang ada sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi waktu, maupun format-formatnya, ini disebabkan banyak faktor, diantaranya kemampuan SDM yang masih kurang baik dari jumlah maupun kualitasnya, biaya transport yang cukup mahal apabila hanya mengantar laporan saja, biasanya Kepala Sekolah/pengelola BOS akan ke Dinas Pendidikan/Sintang untuk mengurus banyak kepentingan, ini dilakukan karena letak sekolah yang cukup jauh.” (wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.30 Wib)

Berdasarkan keterangan tersebut diperoleh informasi bahwa keterlambatan dalam penyerapan dana BOS ke sekolah dipengaruhi banyak hal, kemampuan SDM, kurangnya tenaga di sekolah, dan jarak sekolah, dan keterbatasan dana. Sementara itu Kepala SMP Negeri 1 Ambalau menyatakan

bahwa sekolahnya dapat menyerap dana BOS sesuai jadwal, demikian pula dengan SMP Negeri 1 Kayan Hulu. Kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menyampaikan administrasi dana BOS yang baik, seperti yang dipaparkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu sebagai berikut : “kami tidak memiliki tenaga TU, yang menjadi bendahara adalah guru yang memiliki jam mengajar lebih dari 24 jam. Sedangkan kami memiliki 12 rombongan belajar tetapi guru negeri/PNS hanya 6 orang”. (Wawancara Tanggal 27 Oktober 2011 pukul 14.07 Wib).

Kepala SMP Negeri 1 Ambalau menyatakan kendala yang dihadapi dalam penyampaian administrasi tepat waktu adalah jarak sekolah dengan Ibu Kota Kabupaten yang jauh dan memerlukan biaya transportasi yang besar, demikian pula dengan jumlah tenaga yang tidak memadai. Khusus untuk pengadaan buku teks di dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS, pengadaan buku teks pelajaran di atur dengan jelas. Pengadaan buku teks pelajaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ketentuan ini mengatur tentang pemilihan buku, mekanisme pembelian buku, dan mekanisme pengadaan buku untuk daerah yang belum memiliki pengecer. Pengadaan buku teks yang diharuskan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya selama ini tidak terjadi masalah dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak sekolah dalam menyediakan buku teks yang dibiayai dari dana BOS selalu berpedoman pada buku petunjuk yang ada, sementara itu Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu menyatakan :

“Pengadaan buku pelajaran masih belum terpenuhi sesuai dengan rencana karena guru honor GTT berjumlah 14 orang dan banyak kegiatan sekolah yang harus dilakukan, artinya dana yang ada belum memadai untuk menyediakan buku yang sesuai dengan kebutuhan kami”. (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 14.15 Wib).

Berdasarkan paparan di atas, diperoleh informasi bahwa di SMP Negeri 1 Kayan Hulu kebutuhan akan buku teks belum dapat dipenuhi karena keterbatasan dana dan prioritas anggaran yang belum memadai. menjawab pertanyaan penulis apakah pernah terjadi kesalahan dalam pembelian buku teks, Kepala SMP Negeri 1 Kayan Hulu menyatakan belum pernah terjadi kesalahan dalam pembelian buku teks. Pada SMP Negeri 1 Ambalau kesalahan pembelian buku pernah terjadi diakibatkan karena perubahan kurikulum yang berlaku. Khusus untuk pengadaan buku terdapat pedoman pengadaan buku teks pelajaran.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap administrasi penyaluran dana BOS di Kabupaten Sintang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pengawas dan pengelola dana BOS yang ada. Masih perlunya peningkatan peranan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik yang semakin baik.
2. Monitoring dan evaluasi dalam program BOS di Kabupaten Sintang perlu ditingkatkan terutama dalam memonitor pengelolaan keuangan dan pengadministrasian yang lebih baik. Responden dalam kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS masih belum mewakili pihak Komite Sekolah. Koordinasi dan konsultasi antara berbagai pihak terutama pihak Dinas Pendidikan Kabupaten dan sekolah masih perlu ditingkatkan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam hal peningkatan pengawasan dan monitoring serta evaluasi yang ada terkait administrasi penyaluran yang akuntabel dan tepat waktu adalah dengan melakukan pembinaan secara administrasi dan langsung turun ke sekolah penerima. Untuk meningkatkan pengawasan dana BOS dan mengurangi

biaya monitoring, pengawasan melibatkan pengawas sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang juga selalu menghubungi sekolah-sekolah yang masih belum mampu menyerap dana sesuai jadwal, langkah-langkah yang diambil diantaranya menghubungi via telepon/SMS untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan masukan agar sekolah dapat menyerap dana dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diambil untuk pengawasan administrasi penyaluran dana BOS di Kabupaten Sintang adalah :

1. Pengawasan terhadap administrasi penyaluran dana BOS di Kabupaten Sintang perlu ditingkatkan agar kelancaran operasionalisasi dana BOS tersebut berjalan lancar, diantaranya dengan meningkatkan mutu SDM pengawas maupun pengelola dana BOS melalui pelatihan atau bimbingan teknik pengelolaan keuangan, keahlian yang dimiliki juga harus disertai dengan komitmen yang tinggi dari masing-masing pihak, baik itu pengawas maupun pengelola dana BOS. Pemenuhan terhadap tenaga pengelola/bendahara pada masing-masing sekolah juga sangat diharapkan agar mutu dari laporan administrasi semakin baik. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS, bukan hanya pada perencanaan awal tetapi juga dalam proses pengelolaan lainnya terutama terkait pemanfaatan dana dan aspek-aspek lain yang memang harus diketahui oleh pihak komite sekolah.

2. Monitoring dana BOS di Kabupaten Sintang untuk masa yang akan datang agar lebih memperhatikan dan menitikberatkan pada pengadministrasi dana BOS tersebut, karena masih banyak sekolah yang perlu mendapatkan pembinaan terkait pengelolaan dan pengadministrasian dana BOS. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan Pemda Kabupaten Sintang juga harus menyiapkan SDM yang handal dalam segi kualitas, demikian juga penambahan tenaga-tenaga pengelola dana BOS artinya para pengelola dana BOS di sekolah adalah guru/staf yang memang memiliki cukup waktu untuk melaksanakan penyediaan SPJ dan hal-hal lain terkait pengelolaan dana BOS. Responden dalam kegiatan monev oleh Tim Manajemen BOS baik dari tingkat pusat maupun provinsi agar lebih mewakili semua unsur terkait terutama dari unsur masyarakat atau Komite Sekolah. Sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS yang lebih mendalam dan bersifat teknis juga harus dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan dana BOS, dan pihak-pihak terkait agar selalu menjalin komunikasi yang lebih baik untuk menciptakan kesamaan persepsi. Guna meningkatkan mutu monitoring dan evaluasi, perlu didukung oleh pembiayaan yang sesuai, sehingga penganggaran dana untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang memadai sangat diharapkan.
3. Upaya-upaya yang perlu dilakukan agar pengawasan dan monitoring serta evaluasi berjalan dengan baik perlu dilakukan pembinaan kepengawasan dan pelatihan bagi tenaga pengawas dan pengelola dana BOS agar administrasi penyaluran dapat akuntabel dan tepat waktu. Pihak pengawas dari Dinas

Pendidikan Kabupaten Sintang harus lebih aktif untuk membina sekolah-sekolah yang dianggap perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, mengingat keterbatasan beberapa sekolah dari segi SDM, kondisi geografis dan berbagai hambatan-hambatan lainnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. (2007). *Pemeriksaan intern (internal audit)*. edisi ke-1. Jakarta: Indeks.
- Arifin, A. (2005). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, cetakan ke-1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bahtiar, A. & Muchlis, I. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia Jakarta.
- Bastian, I. (2003). *Audit Sektor Publik*. edisi ke-1. Jakarta: Visi Global Media.
- Brantas. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian kualitatif dasar-dasar dan aplikasi*. edisi ke-1. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh Malang.
- Ikhsan, M., Santosa, A., & Harmanti. (2007). *Administrasi Keuangan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Irawan, P. (2007). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kencana, I. & Safie. (2006). *Ilmu administrasi publik edisi revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Maulana, A. (1992). *Sistem pengendalian manajemen*. edisi ke-6. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Santana, S. (2007). *Menulis Ilmiah: Metode penelitian kualitatif*, edisi ke-1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Singarimbun, M. (1987). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sumarsan, T. (2010). *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Sundarso, dkk. (2007). *Teori Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional.

- Akbar, B. (2011). Pentingnya fungsi evaluasi-monitoring dalam menilai efektifitas kebijakan publik. Diambil 30 Juni 2011, dari situs World Wide Web <http://batukar.info/komunitas/blogs/monitoring-dan-evaluasi-untuk-effektifitas-kebijakan-publik-rujukan>.
- Effendi, M. A. (2007). Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara. Diambil 23 Juni 2011, dari situs World Wide Web <http://muhariefefendi.wordpress.com>.
- Forum Penelitian. (2010). Evaluasi program. Diambil 13 Nopember 2011, dari situs World Wide Web www.forumpenelitian.blogspot.com
- Hileudnews. (2011). Mekanisme penyaluran dana BOS harus tetap diawasi. Diambil 27 Juni 2011, dari situs World Wide Web <http://hileud.com/hileudnews?title=mekanisme+penyaluran+dana+BOS+harus+tetap+diawasi&id=495508>.
- Prasetyo, I. (2009). Definisi monitoring dan evaluasi. Diambil 30 Juni 2011, dari situs World Wide Web <http://iisprasetyo.blogspot.com/2009/06/definisi-monitoring-dan-evaluasi.html>
- Radar Lampung. (2011). Penyaluran dana BOS. Diambil 28 Juni 2011, dari situs World Wide Web <http://radarlampung.co.id/read/opini/tajuk/33758-penyaluran-dana-bos>.
- Raharjo, M. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif. Diambil 8 Nopember 2011, dari situs World Wide Web <http://mudjiarahardjo.com/profile/270.html?task=view>
- Redaksi KBSK. (2011). *World Bank* monitoring dana BOS di Kendari. Diambil 30 Juni 2011, dari situs World Wide Web <http://Kendari.tv/world-bank-monitoring-dana-bos-di-kendari.html>.
- Republika.co.id. (2011). Penyaluran dana BOS disederhanakan. Diambil 30 Juni 2011, dari situs World Wide Web <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/10/12/02/150059-2011-penyaluran-dana-bos-disederhanakan>.
- Sejarah Sintang. (2011). Diambil tanggal 8 Nopember 2011, dari situs World Wide Web <http://sintang.go.id/>
- Suara Merdeka. (2011). Sistem penyaluran dana BOS kembali seperti semula. Diambil 28 Juni 2011, dari situs World Wide Web <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/05/28/86871/sistem-penyaluran-dana-BOS-kembali-seperti-semula>.

- Suzanne. (2009). Pengertian monitoring dan evaluasi. Diambil 30 Juni 2011, dari situs World Wide Web <http://hafidzf.wordpress.com/2009/06/16/pengertian-monitoring-dan-evaluasi/>.
- Taman Agribisnis blog spot.com. (2010). Diambil tanggal 8 Nopember 2011, dari situs World Wide Web <http://taman-agribisnis.blogspot.com/2010/03/bab-i-definisi-monitoring-evaluasi.html>
- Tempo Interaktif. (2010). Menteri Pendidikan Nasional: ada tim monitoring penyimpangan dana bos akan diminimalisir. Diambil 30 Juni 2011, dari situs World Wide Web <http://antikorupsijateng.wordpress.com>.
- Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. (2011). Diambil tanggal 8 Nopember 2011, dari situs World Wide Web <http://www.disdik-sintang.org/index.php?page=visimisi>.
- Wikipedia. (2011). *What Is Evaluation?*. Diambil 30 Juni 2011, dari situs World Wide Web http://evaluationwiki.org/index.php/Evaluation_definition
- Wordpress. (2008). Paradigma baru keuangan publik dan ruang lingkupnya Program. Diambil 13 Nopember 2011, dari situs World Wide Web <http://massofa.wordpress.com/2008/05/01/paradigma-baru-keuangan-publik-dan-ruang-lingkupnya-bag-1/>.
- Wordpress. (2010). Evaluasi dan Evaluasi Program. Diambil 13 Nopember 2011, dari situs World Wide Web <http://kojingtechnolog.wordpress.com>
- Wordpress. (2010). Triangulasi. Diambil 13 Nopember 2011, dari situs World Wide Web <http://3lox.wordpress.com/2010/10/07/triangulasi>.
- Yulianto. (2000). Demokrasi, Akuntabilitas publik dan pengawasan keuangan Negara. Diambil 27 Juni 2011, dari situs World Wide Web <http://kskcp.tripod.com/kelompokstudikeuangandankebijakanpublik/id12.html>.

UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA

Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
 Nama Narasumber : SUNI
 Jabatan : Bendahara pemb.penyaluran dana BOS Tingkat SMP.
 Tanggal : 13 – 14 Oktober 2011.

I. Pengawasan

1. Bagaimana bentuk pengawasan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan Provinsi terhadap Dana BOS?

Jawaban :

“Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan Provinsi biasanya melalui angket/kueisioner dan langsung ke sekolah-sekolah penerima, dan biasanya dilakukan pada akhir tahun”. (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.05 Wib)

2. Badan dan instansi mana saja yang sudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan/penyaluran dana BOS di Kabupaten Sintang?

Jawaban :

“Pada tahun ini (2011) yang sudah melakukan pengawasan adalah dari Tim Manajemen BOS Provinsi, untuk tahun 2010 dilakukan oleh pihak BPKP”. (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.15 Wib)

3. Manfaat pengawasan bagi Sekolah dan Dinas, apakah dapat menghindari berbagai masalah penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan dan lainnya. ?

Jawaban :

“Tentu saja dengan pengawasan mampu menghindari berbagai penyalahgunaan, ataupun pemborosan dan berbagai penyimpangan”. (wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.20 Wib)

4. Apakah pernah terjadi penyalahgunaan penggunaan dana BOS, kalau pernah bagaimana penyelesaiannya dan sanksi-sanksinya?

Jawaban :

“Pernah, biasanya dengan pengembalian dana ke Kas Negara, atau sanksi administrasi lainnya seperti pihak Dinas harus memperingatkan dengan kepala sekolah/pengelola dana BOS dengan surat tertulis”.

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.23 Wib)

Tujuan pengawasan :

5. Apakah dengan pengawasan yang ada, mampu menciptakan suasana yang saling terbuka, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas ?

Jawaban :

“Kadang-kadang biasa, tapi terkadang juga tidak, tergantung berbagai faktor seperti pihak yang mengawasi ataupun yang diawasi apakah masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti dari pihak pengawas apakah betul-betul mempunyai kemampuan dalam bidangnya (faktor SDM) dan apakah pihak yang diawasi mempunyai kemauan yang baik untuk menjalankan program tersebut dengan benar”.

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.30 Wib)

6. Apakah pengawasan ini memberikan dampak yang saling percaya di dalam dan luar organisasi ?

Jawaban :

“ sama seperti pertanyaan tadi, relative, tergantung dari pihak yang diawasi dan yang mengawasi,.. tapi yang terjadi biasanya dapat menciptakan saling percaya, karena kalau dilakukan pengawasan pihak sekolah/pengelola BOS merasa lebih percaya diri bahwa apa yang dilakukan benar. Demikian pula dengan pihak pengawas, dapat melihat langsung apa yang telah dilakukan/dilaksanakan oleh sekolah. Tidak sekedar mendengar isu, laporan-laporan saja.”

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.34 Wib)

Faktor pendukung Pengawasan :

7. Prinsip yang dianut apakah memiliki peranan yang cukup baik dalam menciptakan pengelolaan dan penggunaan Dana BOS yang baik ?.

Jawaban :

“tentu, sangat mendukung..., Kepala sekolah / pengelola yang baik atau yang memiliki prinsip teguh cenderung melaksanakan kegiatan/program sesuai rencana”.

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.45 Wib).

8. Bagaimana peranan agama dan kepercayaan yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan?

Jawaban :

“peranan agama sangat penting, seperti ajaran agama yang menekankan kejujuran, keterbukaan, kerjasama tentu membantu dan mendukung dalam proses pengawasan.”

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.48 Wib)

9. Kebijakan yang dijalankan apakah turut membantu kelancaran pengawasan ?

Jawaban :

“sangat membantu, contohnya kebijakan Kepala Dinas yang memberikan tugas tambahan kepada para pengawas sekolah untuk turut memantau/memonitoring kegiatan di sekolah apakah sesuai dengan laporan-laporan yang ada. Disisi lain mampu menghemat biaya Perjalanan Dinas”.

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.51 Wib)

10. Anggaran pembiayaan yang mendukung apakah sangat berpengaruh dalam melaksanakan pengawasan?

Jawaban :

“ Pengawasan yang baik tentu didukung oleh anggaran yang sesuai, pengawasan bagi sekolah-sekolah yang letaknya jauh memerlukan biaya yang cukup besar , anggaran pembiayaan yang mendukung tentu sangat diharapkan“.

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 09.55 Wib)

11. Guna mendukung pengawasan yang efektif, apakah penempatan pegawai dan prosedur kerja yang ada sangat berpengaruh?

Jawaban:

“Tentu, prosedur kerja yang ada diharapkan mampu mendukung pengawasan efektif, artinya prosedur yang ada akan mempermudah dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana BOS... contohnya untuk memudahkan kontrol terhadap data dan pengurusan dana BOS, bendahara untuk masing-masing jenjang, (SD dan SMP), adalah staf dari masing-masing bidang, sehingga jika terjadi selisih data akan mudah terdeteksi secara cepat, dan pihak sekolah akan mudah berkoordinasi/konsultasi di masing-masing bidang.”

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.05 Wib)

12. Bagaimana peranan koordinasi dalam rangka pengawasan yang baik?

Jawaban :

“Peranan koordinasi sangat penting, biasanya pihak pengawas (Tim manajemen BOS pusat/Provinsi, BPK, BPKP atau Inspektorat) sebelum turun ke sekolah-sekolah akan menghubungi pihak Dinas Pendidikan, biasanya untuk meminta informasi terkait sekolah-sekolah yang akan dituju, seperti untuk mengetahui lokasinya, jumlah dana, dan berbagai informasi yang dibutuhkan guna memperlancar proses pengawasan.... Apabila sudah selesai pengawasan biasanya pihak pengawas akan berkoordinasi kembali, seperti cara-cara pembinaan ke sekolah, atau bagaimana cara melakukan pengawasan yang akan datang”.

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.11 Wib)

Asas-asas pengawasan :

13. Apakah dengan dilakukannya pengawasan mampu memberikan kontribusi yang baik guna mencapai tujuan Program BOS?

Jawaban :

“tentu saja pengawasan sangat berpengaruh dan mampu memberikan kontribusi yang baik dalam mencapai tujuan yang diharapkan”.

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.15 Wib)

14. Apakah dengan pengawasan mampu menciptakan efisiensi dalam pengelolaan Dana BOS?

Jawaban :

“Jelas, dengan dilakukan pengawasan berbagai pemborosan/penyalahgunaan dalam pengelolaan dana BOS dapat di hindari ”

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.17 Wib)

15. Apakah dengan adanya pengawasan mampu meningkatkan rasa tanggungjawab pada Manajer/Kepala Sekolah?

Jawaban :

“ya, dengan adanya pengawasan, para pengelola dana BOS akan semakin merasa perlu untuk mengelola dana BOS dengan baik, otomatis tanggungjawab mereka akan meningkat terutama agar

lebih berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut dan selalu berpedoman pada ketentuan”.

(wawancara tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.20 Wib)

16. Apakah dengan adanya pengawasan mampu mengatasi/memberikan solusi bagi program BOS di masa yang akan datang?

Jawaban :

“ya, berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BOS yang terjadi sebelumnya akan selalu menjadi pertimbangan/acuan dalam menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, atau dimasa yang akan datang, untung rugi dari sebuah kebijakan yang diambil dimasa lampau akan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan/pemecahan masalah di masa kini maupun yang akan datang.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.05 Wib)

17. Apakah dengan adanya pengawasan mampu meningkatkan partisipasi dari manajer bawahan?

Jawaban :

“tentu saja,...karena setiap penggunaan dana akan selalu dimintai pertanggungjawabannya, biasanya penggunaan dana yang sudah diatur sedemikian rupa misalnya untuk setiap unit/sub kegiatan pasti terdapat orang/pengelola yang bertanggungjawab atas setiap kegiatan tersebut, dengan demikian orang/unit tersebut yang akan dapat menjelaskan dengan sedetail mungkin setiap tindakan yang diambil atau dana yang digunakannya, artinya mereka akan berpartisipasi dalam memberikan informasi apabila pengawasan dilakukan”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.15 Wib)

18. Apakah pengawasan dilakukan selalu berpedoman pada rencana awal/refleksi awal ?

Jawaban :

“tentu, yang akan menjadi pedoman adalah Buku Petunjuk BOS, RKA, dan dibandingkan dengan SPJ atau laporan keuangan yang ada”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.18 Wib)

19. Apakah dalam melakukan pengawasan selalu disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada?

Jawaban :

“selalu disesuaikan dengan struktur organisasi, pemeriksaan biasanya dilakukan bertahap atau selalu berpedoman pada struktur organisasi dengan mempertimbangkan garis koordinasi, garis komando dan sebagainya”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.21 Wib)

20. Apakah pengawasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajer?

Jawaban :

“tentu saja, ...kebutuhan akan informasi yang akurat tentang berbagai hal yang dibutuhkan, dalam menanggapi isu/laporan-laporan merupakan contoh nyata kalau pengawasan dapat dilakukan apabila manajer membutuhkan informasi yang sifatnya mendesak”

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.25 Wib)

21. Apakah dalam melakukan pengawasan ada standar yang digunakan?.

Jawabannya :

“ada, kalau disini biasanya berpedoman pada buku petunjuk, atau kalau harga barang, ada standar harga/buku standar harga barang yang dikeluarkan oleh Bupati”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.31 Wib)

22. Apakah strategi yang ada dalam pengelolaan dana BOS juga diawasi?.

Jawaban :

“ diawasi...Rencana Kerja Sekolah merupakan strategi yang disusun oleh pihak sekolah dalam pemanfaatan dana BOS agar dapat mencapai tujuannya,...pengawasan bias berpatokan pada rencana awal, dapat terlihat konsisten tidaknya strategi yang diambil oleh pengelola/kepala sekolah”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.34 Wib)

23. Apakah ada pengecualian dalam pengawasan?

Jawaban :

“ada,..pengawasan harus memperhitungkan berbagai faktor, seperti iklim, keadaan atau kondisi obyek yang akan diawasi..”

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.40 Wib)

24. Apakah pengawasan dilakukan secara fleksibel ?

Jawaban :

“pengawasan harus fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.42 Wib)

25. Apakah system pengawasan selalu ditinjau kembali?

Jawaban :

“biasanya ditinjau kembali, terutama kalau dirasa kurang efektif dan efisien”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.43 Wib)

26. Tindakan-tindakan apa yang biasanya dilakukan terhadap berbagai penyimpangan/kesalahan-kesalahan administrasi yang menjadi temuan ?.

Jawaban :

“pengembalian disertai catatan-catatan atau pemberitahuan lisan, agar segera diperbaiki atau dilengkapi”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 11.45 Wib)

Bentuk-bentuk pengawasan :

27. Bagaimana bentuk pengawasan sebelum program BOS dilaksanakan/dialurkan?

Jawaban :

“pengawasan biasanya hanya memvalidasi data penerima BOS se Kabupaten, yang mencakup data sekolah dan jumlah siswa penerima dana BOS, data ini berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pihak sekolah sebelumnya, dicocokkan dengan data siswa yang riil pada saat dana akan dialurkan”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.08 Wib)

28. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan setelah program BOS dilaksanakan/dialurkan?

Jawaban :

“pengawasan dilakukan secara langsung ke sekolah atau melalui SPJ, ada juga yang melalui angket, lembar monev, dan daftar isian lainnya, tergantung kebutuhan”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.10 Wib)

29. Apakah pengawasan juga dilakukan selama proses penyaluran dan jadwal sudah ditentukan, ataukah dilakukan secara mendadak, dan bagaimana bentuk pengawasan melekat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan?

Jawaban :

“selama proses penyaluran tetap dilakukan pengawasan baik secara langsung atau melalui SPJ setiap triwulan, ada juga yang sudah dijadwalkan, tetapi dapat pula dilakukan tiba-tiba/mendadak contohnya apabila terdapat laporan dari masyarakat yang dianggap perlu diselesaikan/diatasi”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.15 Wib)

- **Monitoring.**

1. Bagaimana Tim manajemen Provinsi memonitor pelaksanaan/penyaluran dana BOS di Kabupaten ?

Jawaban :

“melalui laporan yang disampaikan pihak kabupaten, selanjutnya di lakukan monitoring ke kabupaten (ke Dinas Pendidikan dan langsung ke sekolah penerima)”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.21 Wib)

2. Bagaimana Tim Manajemen Kabupaten melakukan monitoring pelaksanaan/penyaluran dana BOS di masing-masing sekolah penerima?

Jawaban:

“melalui laporan pertanggungjawaban keuangan/SPJ dan dilanjutkan dengan monitoring ke sekolah penerima agar dapat melihat secara langsung bukti fisik dari penggunaan dana atau kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana tersebut”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.25 Wib)

3. Bagaimana memonitor alokasi dana pada sekolah penerima ?

Jawaban:

“Pengalokasian dana ini dapat dimonitor melalui Rencana Kerja Sekolah/lembar kerja”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.26 Wib)

4. Bagaimana cara memonitor penyaluran dan penggunaan dana?

Jawaban :

“melalui laporan keuangan setiap triwulan, ada buku rekap/khusus untuk dapat melihat setiap penyaluran dana/penyerapan dana tersebut”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.29 Wib)

5. Apabila ada pengaduan terhadap penyalahgunaan dana BOS, bagaimana pihak terkait menanggapi/penanganan terhadap pengaduan tersebut.

Jawaban:

“biasanya dibentuk tim pengawas yang akan melihat langsung dan melakukan pengawasan guna mencari bukti dan informasi terkait pengaduan tersebut, selanjutnya apabila terbukti ada penyalahgunaan akan diambil langkah penanganan segera mungkin”.

(wawancara tanggal 25 Oktober 2011 pukul 14.32 Wib)

6. Bagaimana Tim Manajemen memonitor administrasi keuangan dana BOS/Laporan dana BOS?

Jawaban:

“melalui rekap penyampaian SPJ, akan terlihat sekolah mana yang sudah menyelesaikan dan belum, yang sudah diterima biasanya sudah sesuai ketentuan, atau walaupun ada yang perlu dilengkapi tidak terlalu mendesak”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.23 Wib)

7. Apakah semua laporan/adm. Keuangan tersebut sudah sesuai dengan format atau aturan yang ada? Berapa persen tingkat kesalahan?

Jawaban :

“belum 100 %, sekitar 10 % tingkat kesalahan..”

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.26 Wib)

8. Apabila terjadi kesalahan pengadministrasian dan pelaporan dana BOS, bagaimana pihak dinas pendidikan mengatasinya?

Jawaban :

“akan ada teguran, biasanya secara lisan, bila perlu diberikan catatan-catatan sebagai bahan koreksi”

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.29 Wib)

9. Faktor apa saja yang sangat mempengaruhi pihak sekolah agar dapat mengadministrasikan penggunaan dan pengelolaan Dana BOS dengan baik dan sesuai aturan?

Jawaban:

“faktor yang paling berpengaruh, SDM baik secara kualitas maupun kuantitas, dan Faktor geografis”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.32 Wib)

10. Bagaimana memonitor penyaluran dan penyerapan dana di sekolah? Apa bila belum tersalurkan sesuai jadwal langkah-langkah apa yang dilakukan ?

Jawaban :

“Untuk memonitor penyaluran dan penyerapan dana di sekolah kami gunakan buku pembantu, apabila belum tersalurkan kami akan mengingatkan secara lisan atau menggunakan SMS”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.40 Wib)

11. Bagaimana memonitor penggunaan dana BOS ?

Jawaban :

“Memonitor penggunaan dana BOS biasanya melalui laporan/SPJ yang disampaikan”

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.43 Wib)

12. Pihak-pihak mana saja yang biasanya menjadi responden apabila pihak Dinas memonitoring dana BOS ke sekolah?

Jawaban :

“pihak yang menjadi responden adalah Kepala Sekolah, Dewan guru, murid atau orang tua siswa”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.45 Wib)

13. Apakah Monitoring dilakukan sebelum dan sesudah dana BOS disalurkan?

Jawaban :

“Biasanya sesudah disalurkan baru diadakan monitoring”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.50 Wib)

14. Untuk membiayai kegiatan monitoring apakah dana untuk monitoring memadai, jika belum langkah apa yang dilakukan agar pelaksanaan monitoring berjalan dengan baik?.

Jawaban :

“Cukup memadai, biasanya kalau terdapat kekurangan-kekurangan, para Pengawas Sekolah akan diperbantukan untuk melaksanakan monitoring”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.55 Wib)

15. Apakah peranan pengawasan oleh pihak pengawas terhadap sekolah cukup efektif dalam membantu kelancaran monitoring Dana BOS?

Jawaban :

“selama ini cukup efektif dan sangat membantu”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 08.59 Wib)

16. Apakah berbagai pengaduan terkait penggunaan Dana BOS sudah diidentifikasi dengan baik ?

Jawaban :

“Sudah, biasanya kalau ada bukti-bukti pendukung terhadap pengaduan tersebut akan segera ditindaklanjuti”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.10 Wib)

17. Berbagai permasalahan yang timbul mampukah diselesaikan serta didokumentasikan dengan baik?

Jawaban :

“Selama ini biasa diselesaikan, biasanya kami akan membuat berita acara pemeriksaan berikut mendokumentasikan berbagai dokumen-dokumen terkait seperti bukti pengaduan, surat-surat pernyataan dan sebagainya”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.13 Wib)

18. Apakah juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS di masa yang akan datang ?

Jawaban :

“tentu saja, permasalahan-permasalahan yang ada berikut penyelesaiannya akan menjadi pertimbangan bagi pelaksanaan dan pengelolaan BOS dimasa yang akan datang”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.25 Wib)

19. Apabila terdapat pengaduan dan penyimpangan terkait dengan penggunaan dana BOS, kerjasama dilakukan dengan lembaga-lembaga/instansi mana saja?

Jawaban :

“selama ini kami hanya berkerjasama dengan inspektorat, BPK, BPKP saja, dan kerjasama ini lebih kearah pembinaan saja”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.28 Wib)

20. Apakah bila terjadi masalah di sekolah, responden atau pihak-pihak yang dimintai keterangan cukup memadai/disesuaikan dengan kasus yang ada?

Jawaban :

“ya, setiap masalah di sekolah, pihak yang dimintai keterangan tentu disesuaikan dengan kasus atau permasalahan yang ada”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 09.31 Wib)

- **Evaluasi.**

1. Bagaimana cara mengevaluasi program BOS di Kabupaten maupun per sekolah penerima?

Jawaban :

“biasanya melalui angket/atau isian pertanyaan yang diedarkan sewaktu monitoring, informasi yang sudah didapat itulah yang kemudian akan dievaluasi”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.06 Wib)

2. Bagaimana menindaklanjuti jika ditemukan adanya penyimpangan dan permasalahan di dalam pelaksanaan program BOS di Kabupaten Sintang?.

Jawaban :

“Kalau ada penyimpangan di sekolah penerima untuk tahap awal biasanya hanya pembinaan saja, tetapi bila sudah dirasa perlu tindakan atau sanksi akan diberikan sanksi yang sesuai, diantaranya

sanksi administrasi atau sanksi kepegawaian, dan jika terdapat permasalahan dalam program BOS di Kabupaten Sintang pihak Dinas akan berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS provinsi atau pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi yang terbaik”.
(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.10 Wib)

II. Administrasi Penyaluran dana BOS.

Khusus untuk tahun 2011 tahapan penyaluran yang ada adalah sebagai berikut : Dana masuk ke KPKN selanjutnya di transfer ke Kas Daerah dari Kas Daerah baru disalurkan ke rekening sekolah.

1. Apakah waktu penyelesaian dan penetapan SK oleh Tim manajemen BOS Pusat dan Provinsi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?

Jawaban :

“sesuai jadwal”

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.14 Wib)

2. Apakah penetapan dan penyelesaian DIPA, MoU dengan lembaga penyalur sesuai jadwal ?

Jawaban :

“Sesuai jadwal”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.18 Wib)

3. Apakah waktu penyaluran dana setiap triwulan ke sekolah penerima sesuai jadwal?

Jawaban:

“ada yang sesuai jadwal, ada pula yang tidak, yang tidak sesuai jadwal biasanya disebabkan karena SPJ terlambat, atau karena kesalahan administrasi yang pada akhirnya juga menyebabkan jadwal penyaluran untuk tiap triwulan jadi terlambat karena harus memperbaiki beberapa kesalahan/melengkapi administrasinya”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.21 Wib)

4. Apakah laporan yang diterima sudah sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi waktu dan format/administrasi yang berlaku ?

Jawaban :

“ kalau dirata-ratakan 80 % saja laporan yang ada sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi waktu, maupun format-formatnya,.. ini disebabkan banyak faktor, diantaranya kemampuan SDM yang masih kurang baik dari jumlah maupun kualitasnya, Biaya transport yang cukup mahal apabila hanya mengantar laporan saja, biasanya Kepala Sekolah/pengelola BOS akan ke Dinas Pendidikan/Sintang untuk mengurus banyak kepentingan, ini dilakukan karena letak sekolah yang cukup jauh.”

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.30 Wib)

5. Khusus untuk pengadaan Buku teks pelajaran apakah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku?

Jawaban :

“sudah sesuai aturan semua, berdasarkan buku petunjuk”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2011 pukul 11.33 Wib)

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA : SMP Negeri 1 Ambalau.
 NAMA NARASUMBER : SAMSURIZAL, S.Sos
 JABATAN : Kepala SMPN 1 Ambalau Kec. Ambalau.
 TANGGAL WAWANCARA : 27 Oktober 2011.

Informasi Umum :

1. Nama sekolah : SMP NEGERI 1 AMBALAU
2. Tahun Berdiri : 1993.
3. Jlh. Guru : 15 orang (7 PNS, 6 PTT)
4. Jlh. Siswa : 374.

I. Pengawasan

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Pengawas sekolah terhadap Dana BOS di sekolah Saudara?

Jawaban :

“Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan biasanya dalam bentuk pengawasan administrasi dan kadang-kadang juga langsung ke sekolah untuk melihat kondisi sekolah atau hasil yang dicapai, menghadiri kegiatan-kegiatan yang didanai oleh dana BOS”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.30 Wib)

2. Badan dan instansi mana saja yang sudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan/penyaluran dana BOS di sekolah Saudara?

Jawaban :

“ Instansi yang sudah melakukan pengawasan di sekolah kami adalah Inspektorat Kabupaten Sintang”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.35 Wib)

3. Manfaat pengawasan bagi Sekolah, apakah dapat menghindari berbagai masalah penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan dan lainnya. ?

Jawaban :

“Tentu saja, dengan pengawasan kami merasa sangat terbantu, sehingga tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, tidak terjadi kebocoran dan pemborosan keuangan sehingga kami dapat bebas dari sanksi-sanksi yang ada”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.37 Wib)

II. Tujuan pengawasan :

1. Apakah dengan dilakukannya berbagai pengawasan, pihak sekolah merasa terbantu dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien?

Jawaban :

“ia, jelas sekali kami merasa sangat terbantu, karena para pengawas juga melakukan pembinaan, masukan dan saran-saran mereka sangat penting bagi kami sehingga kami dapat mencapai tujuan kami dengan lebih efektif dan efisien”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.45 Wib)

2. Apakah pengawasan ini memberikan dampak yang saling percaya di dalam dan luar organisasi ?

Jawaban :

“ia, mampu memberikan rasa saling percaya, menghindari praduga dan berbagai anggapan yang kadang-kadang sangat mengganggu, baik yang datang dari dalam organisasi kami sendiri maupun dari masyarakat luas.”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.47 Wib)

3. Apakah dengan adanya pengawasan, operasionalisasi dana BOS dapat berjalan dengan lancar?

Jawaban:

“ia, dengan pengawasan kami dapat mengetahui berbagai kekurangan-kekurangan kami baik dari segi administrasi ataupun program kegiatan yang kami lakukan, kami akan melakukan perbaikan secepatnya dan dana BOS dapat diserap sesuai dengan jadwalnya”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.51 Wib)

III. Faktor pendukung Pengawasan :

1. Program yang telah ditentukan dan diimplementasikan apakah turut membantu kelancaran pengawasan ?

Jawaban:

“ Pengawasan ini biasanya akan berjalan lancar dan baik bila kami juga telah melakukan perencanaan awal yang baik, artinya pengawasannya akan mengacu pada rancangan awal kami, kami akan melakukan kegiatan sesuai rencana awal (RKS), apabila tidak sesuai dengan rencana tersebut tentu akan menjadi pertanyaan dan kami harus siap untuk memberikan jawaban yang benar”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 09.56 Wib)

2. Bagaimana peranan koordinasi dalam rangka pengawasan yang baik?

Jawaban:

“peranan koordinasi, tentu dapat membantu mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada dilapangan/sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.05 Wib)

IV. Asas pengawasan :

1. Apakah pengawasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajer?

Jawaban :

“ia, tentu saja, pengawas biasanya melakukan pengawasan sesuai dengan kebutuhan mereka, ada yang terfokus pada kurikulum, ada yang

menitikberatkan pada pemanfaatan dana atau hanya pada pengadministrasiannya”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.07 Wib)

V. Bentuk-bentuk pengawasan :

1. Bagaimana bentuk pengawasan sebelum program BOS dilaksanakan/dialurkan?

Jawaban:

“ biasanya, pengawasan dilakukan terhadap data awal seperti jumlah siswa dan format-format yang digunakan/pendukung”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.11 Wib)

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan setelah program BOS dilaksanakan/dialurkan?

Jawaban :

“pengawasan dilakukan terhadap SPJ dan kelengkapannya, pengawasan langsung ke sekolah, melihat pemanfaatan dana”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.14 Wib)

VI. Administrasi Penyaluran dana BOS.

1. Apakah SMP Saudara selalu dapat menyerap dana BOS sesuai jadwal?

Jawaban:

“untuk saat ini kami selalu dapat menyerap dana BOS sesuai dengan jadwal yang ada”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.16 Wib)

2. Apa yang menjadi kendala bagi pihak sekolah dalam menyajikan laporan yang baik dan tepat waktu?

Jawaban:

“jumlah tenaga yang tidak memadai, jarak sekolah kami yang jauh ke Kabupaten, tentu memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.19 Wib)

3. Apabila melakukan pengadaan buku pelajaran, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ada ?.

Jawaban :

“Ya, kami selalu berpedoman pada ketentuan yang ada dalam buku petunjuk BOS”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.23 Wib)

4. Pernahkan terjadi kesalahan dalam pengadaan buku pelajaran? Baik dari segi bukunya maupun syarat pengadaannya?

Jawaban :

“pernah, hal ini disebabkan oleh kurikulum sekolah yang berubah”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 10.26 Wib)

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA : SMP Negeri 1 Kayan Hulu
 NAMA NARASUMBER : Wasli,M.Pd
 JABATAN : Kepala Sekolah
 TANGGAL WAWANCARA : 27 Oktober 2011.

Informasi Umum :

1. Nama sekolah : SMP NEGERI 1 KAYAN HULU.
2. Tahun Berdiri :..... SK. Pendirian no.....
3. Jlh. Guru : 17 Orang (6 PNS, 11 GTT), FU/IT = 3 orang
4. Jlh. Siswa : 467 siswa.

I. Pengawasan

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau Pengawas sekolah terhadap Dana BOS di sekolah Saudara?

Jawaban :

“Pengawasan berbentuk sosialisasi dan pembinaan terhadap sekolah mengenai penggunaan dana BOS yang tepat waktu, tepat penggunaan dan sasaran sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan”.

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.15 Wib)

2. Badan dan instansi mana saja yang sudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan/penyaluran dana BOS di sekolah Saudara?

Jawaban :

“Selain pengawas dan Dinas pendidikan, adalah pengawas dari Inspektorat Kabupaten”.

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.20 Wib)

3. Manfaat pengawasan bagi Sekolah, apakah dapat menghindari berbagai masalah penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan dan lainnya. ?

Jawaban :

“Terhadap pengawasan yang bersifat pembinaan sangatlah membantu pihak sekolah untuk menghindari segala penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena banyak hal yang belum dipahami. Setelah mendapatkan penjelasan yang gamblang kami dapat merealisasikan penggunaan dana BOS yang berpedoman pada RAKS sampai pelaporan tidak akan terjadi selisih maupun kesalahan.”

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.26 Wib)

II. Tujuan pengawasan :

1. Apakah dengan dilakukannya berbagai pengawasan, pihak sekolah merasa terbantu dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien?

Jawaban :

“kami merasa sangat terbantu”.

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.28 Wib)

2. Apakah pengawasan ini memberikan dampak yang saling percaya di dalam dan luar organisasi ?

Jawaban :

“Selama ini tetap berkomitmen saling percaya”.

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.29 Wib)

3. Apakah dengan adanya pengawasan, operasionalisasi dana BOS dapat berjalan dengan lancar?

Jawaban :

“Jelas, berjalan dengan benar”.

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.31 Wib)

III. Faktor pendukung Pengawasan :

1. Program yang telah ditentukan dan diimplementasikan apakah turut membantu kelancaran pengawasan ?

Jawaban :

“Sangat membantu”.

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.45 Wib)

2. Bagaimana peranan koordinasi dalam rangka pengawasan yang baik?

Jawaban :

“sangat menentukan, untuk meluruskan jika ada yang keliru”.

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.56 Wib)

IV. Asas pengawasan :

1. Apakah pengawasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajer?

Jawaban :

“Pengawasan yang dilakukan selama ini kami rasakan sangat bermanfaat, artinya sesuai dengan keinginan kami selaku manajer di sekolah”.

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.50 Wib)

V. Bentuk-bentuk pengawasan :

1. Bagaimana bentuk pengawasan sebelum program BOS dilaksanakan/disalurkan?

Jawaban :

“Pengawasan sebelum program BOS lebih banyak berbicara mengenai bagaimana meningkatkan mutu pembejaraan di sekolah melalui stakeholders dan MBS”.

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.55 Wib)

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan setelah program BOS dilaksanakan/dialurkan?

Jawaban :

“setelah program BOS dilaksanakan, lebih menekankan peningkatan mutu sesuai dengan RAKS yang telah dibuat serta sarana prasarana pendukung, baik pengadaan buku dan sebagainya artinya lebih kompleks.”

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 13.59 Wib)

VI. Administrasi Penyaluran dana BOS.

1. Apakah SMP Saudara selalu dapat meyerap dana BOS sesuai jadwal?

Jawaban :

“ya”. (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 14.02 Wib)

2. Apa yang menjadi kendala bagi pihak sekolah dalam menyajikan laporan yang baik dan tepat waktu?

Jawaban :

“Kami tidak memiliki tenaga TU, yang menjadi bendahara adalah guru yang memiliki jam mengajar lebih dari 24 jam. Sedangkan kami memiliki 12 rombongan belajar tetapi guru negeri/PNS hanya 6 orang”.

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 14.07 Wib)

3. Apabila melakukan pengadaan buku pelajaran, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang ada ?.

Jawaban :

“Pengadaan buku pelajaran masih belum terpenuhi sesuai dengan rencana karena guru honor GTT berjumlah 14 orang dan banyak kegiatan sekolah yang harus dilakukan, artinya dana yang ada belum memadai untuk menyediakan buku yang sesuai dengan kebutuhan kami”.

(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 14.15 Wib)

4. Pernahkan terjadi kesalahan dalam pengadaan buku pelajaran? Baik dari segi bukunya maupun syarat pengadaannya?

Jawaban :

“belum pernah”. (Wawancara tanggal 27 Oktober 2011 pukul 14.17 Wib).

Nama Responden : Muhamad effendi.

Umur : 36 Tahun.

Jabatan : Guru SMPN 1 Ambalau.

1. Menurut Saudara apakah ada manfaat dari pengawasan (misalnya mampu menciptakan suasana yang saling terbuka, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas, saling percaya).

Jawaban :

“Ada.” (wawancara Tanggal 30 Oktober 2011, pukul 11.45 WIB).

2. Apakah anda dilibatkan dalam pengelolaan/pemanfaatan dana bos, atau pengawasannya, bagaimana bentuknya?

Jawaban :

“Bentuk keterlibatan berupa pemanfaatan dana BOS untuk kegiatan ekstrakurikuler, selanjutnya jika ada rehab/perbaikan sekolah selalu saya yang menangani/mengurusnya” (wawancara Tanggal 30 Oktober 2011, pukul 11.50 WIB).

3. Pernah kah menjadi responden, apabila ada pemeriksaan?

Jawaban :

“Pernah” (wawancara Tanggal 30 Oktober 2011, pukul 12.01 WIB).

4. Pernahkan ada permasalahan terkait dana BOS, biasanya bagaimana penyelesaiannya?

Jawaban :

“sampai saat ini tidak ada”. (wawancara Tanggal 30 Oktober 2011, pukul 12.11 WIB).

5. Apa saran-saran untuk pengelolaan dana BOS yang akan datang?

Jawaban :

“Pengelolaan dana BOS lebih terbuka, Sosialisasi yang lebih mendalam/teknis dalam pengelolaan dana BOS”. (wawancara Tanggal 30 Oktober 2011, pukul 12.25 WIB).

Nama Responden : YUNAS

Umur : 45 Tahun.

Jabatan : Komite SMPN 1 Ambalau.

1. Menurut Saudara apakah ada manfaat dari pengawasan (misalnya mampu menciptakan suasana yang saling terbuka, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas, saling percaya) ?

Jawaban :

“tentu saja ada” (Wawancara tanggal 30 Oktober 2011, Pukul 8.31)

2. Apakah anda dilibatkan dalam pengelolaan/pemanfaatan dana bos, atau pengawasannya, bagaimana bentuknya?

Jawaban :

“saya/kami, komite sekolah hanya dilibatkan pada awal rapat saja, untuk perencanaan penggunaan BOS saja, selanjutnya tidak pernah lagi” (Wawancara tanggal 30 Oktober 2011, Pukul 8.34)

3. Pernah kah menjadi responden, apabila ada pemeriksaan?

Jawaban :

“Tidak Pernah”. (Wawancara tanggal 30 Oktober 2011, Pukul 8.37)

4. Pernahkah ada permasalahan terkait dana BOS, biasanya bagaimana penyelesaiannya?

Jawaban :

“sampai saat ini belum ada.” (Wawancara tanggal 30 Oktober 2011, Pukul 8.45)

5. Apa saran-saran untuk pengelolaan dana BOS yang akan datang?

Jawaban :

“Agar pihak sekolah lebih melibatkan orang tua/komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS, perlu dilakukan pengawasan yang lebih sering”.
(Wawancara tanggal 30 Oktober 2011, Pukul 8.55)

Nama Responden : Erpendi Putra

Umur : 50 th.

Jabatan : Guru SMPN 1 Kayan Hulu.

1. Menurut Saudara apakah ada manfaat dari pengawasan (misalnya mampu menciptakan suasana yang saling terbuka, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas, saling percaya).

Jawaban :

“Ada”. (Wawancara tanggal 1 Nopember 2011, Pukul 9.15)

2. Apakah anda dilibatkan dalam pengelolaan/pemanfaatan dana bos, atau pengawasannya, bagaimana bentuknya?

Jawaban :

“Terlibat, kepala Sekolah selalu koordinasi (karena guru /senior, mantan Kasek) untuk berbagai kegiatan dan pengelolaan dana BOS, juga penggunaan dana untuk kegiatan ekstra kurikuler. (Wawancara tanggal 1 Nopember 2011, Pukul 9.25)

3. Pernah kah menjadi responden, apabila ada pemeriksaan?

Jawaban :

“Pernah” (Wawancara tanggal 1 Nopember 2011, Pukul 10.05)

4. Pernahkan ada permasalahan terkait dana BOS, biasanya bagaimana penyelesaiannya?

Jawaban :

“Hampir-hampir tidak ada, karena selalu bepedoman pada petunjuk” (Wawancara tanggal 1 Nopember 2011, Pukul 10.15)

5. Apa saran-saran untuk pengelolaan dana BOS yang akan datang?

Jawaban :

“Peningkatan dana BOS (lebih dari 50% dana BOS digunakan untuk membayar tenaga guru/TU), aturan lebih fleksibel, dana perjalanan dinas untuk sekolah yang dipedalaman” (Wawancara tanggal 1 Nopember 2011, Pukul 10.25)

Nama Responden : Jais

Umur : 43 Tahun.

Jabatan : Komite SMPN 1 Kayan Hulu.

1. Menurut Saudara apakah ada manfaat dari pengawasan (misalnya mampu menciptakan suasana yang saling terbuka, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas, saling percaya).

Jawaban :

“Tentu ada manfaat, karena pada hakekatnya setiap orang perlu di awasi, agar terhindar dari berbagai masalah dan sangat membantu sekolah yang bersangkutan (dalam kaitanya dengan partisipasi dan saling percaya). (Wawancara tanggal 3 Nopember 2011, pukul 14.20)

2. Apakah anda dilibatkan dalam pengelolaan/pemanfaatan dana bos, atau pengawasannya, bagaimana bentuknya?

Jawaban :

“terlibat, dalam perencanaan dan sebagainya” (wawancara tanggal 3 Nopember 2011, pukul 14.35)

3. Pernah kah menjadi responden, apabila ada pemeriksaan?

Jawaban :

“ belum pernah” (wawancara tanggal 3 Nopember 2011, pukul 14.45)

4. Pernahkan ada permasalahan terkait dana BOS, biasanya bagaimana penyelesaiannya?

Jawaban :

“untuk sementara belum atau tidak ada” (wawancara tanggal 3 Nopember 2011, pukul 14.46)

5. Apa saran-saran untuk pengelolaan dana BOS yang akan datang?

Jawaban :

- “ - Agar dana BOS dapat dikelola dengan baik dan terbuka
- Pihak sekolah agar selalu berkoordinasi dengan komite dalam pemanfaatan dana BOS.

- Agar dana BOS lebih banyak digunakan untuk siswa, kalau bisa 60% dari jumlah total.
- Agar Pengawasan jangan hanya berdasarkan laporan semata, sebaiknya pihak Dinas Pendidikan harus sering mengecek ke lapangan/sekolah untuk melihat realisasi/penggunaan dana BOS tersebut.”

(wawancara tanggal 3 Nopember 2011, pukul 14.55)

UNIVERSITAS TERBUKA

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Elisabeth Rafika
2. NIM : 015974082
3. Jenis Kelamin : Perempuan.
4. Tempat dan Tanggal lahir : Sintang, 06 Juni 1977.
5. Agama : Katolik
6. Alamat : Desa Marunsu Kec. Samalantan Kab.
Bengkayang Kalbar.
7. Pekerjaan : PNS.
8. Status : Kawin.
9. Nama Suami : Anselmus Tri Admo Widodo

Samalantan, Januari 2012.

ELISABETH RAFIKA

NIM. 015974082